

# STRUKTURALISME KONFLIK : PEMAHAMAN AKAN KONFLIK PADA MASYARAKAT INDUSTRI MENURUT LEWIS COSER DAN RALF DAHRENDORF

Argyo Demartoto  
Sosiologi  
FISIP Universitas Sebelas Maret

## **Abstract**

*The effect of industrialization process cannot be apart from the presence of the problems tending to lead to the social jealousy, both materialistic ini nature and due to the presence of the inharmonious relationship or interaction between the elements within industrial society in the form of social distortion or called conflict within industrial society. The conflict approach proposed by Coser as conflict functionalism means that in the presence of conflict, consensus, integration and dissension is an intact unity in undertaking a fundamental process, despite different content of each portion of each correlated social system. The conflict theory proposed by Ralf Dahrendorf is the struggle of class existing in industrial society, not emphasizing on the thinking of production infrastructures but power holding, encompassing the legitimate right to dominate others.*

**Key words:** *industrial society, conflict, functionalism, the struggle of class existing.*

## **A. Pengantar**

Masyarakat yang ada di kawasan industri terdiri dari beberapa unsur elemen sosial yang terbentuk karena adanya perkembangan sebuah proses industrialisasi. Permasalahan yang muncul di dalam lingkungan masyarakat industri antara lain: hubungan atau interaksi antara atasan-pekerja buruh-masyarakat sekitar pabrik, adanya perubahan-perubahan yang diakibatkan kehadiran bangunan-bangunan pabrik yang berada disekitar masyarakat baik yang bersifat sosial, budaya, ekonomi hingga pengaruh perkembangan yang mengarah pada pemahaman atas sifat yang materialistik.

Imbas dari adanya proses industrialisasi tidak terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan yang cenderung mengarah

pada kecemburuan-kecemburuan sosial, baik yang bersifat materialistik maupun yang diakibatkan dari adanya hubungan atau interaksi yang tidak harmonis dari setiap unsur elemen yang ada di masyarakat industri dalam bentuk distorsi-distorsi sosial yang mana menurut penulis hal itu dinamakan sebagai konflik dalam masyarakat industri.

## **B. Mempertahankan Struktur Melalui Konflik: Lewis Coser**

Penekanan teori konflik ini adalah bahwa tingkat struktur sosial yang berada di masyarakat, dimana susunan struktur yang tercipta merupakan suatu hasil persetujuan dan konsensus yang sekaligus mengarah pada proses konflik sosial (Poloma, 1994:

106 – 107). Pemahaman akan konflik menurut Coser merupakan suatu kesadaran yang mencerminkan semangat pembaharuan di dalam masyarakat yang mana nantinya mungkin akan dapat dijadikan sebagai suatu alat yang sifatnya instrumental di dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan atas struktur sosial yang ada. Selain itu konflik juga dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau beberapa kelompok yang akhirnya dengan adanya konflik inipun akan membuat kelompok yang lain untuk memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial di sekelilingnya.

Seluruh fungsi positif konflik (keuntungan dari situasi konflik yang memperkuat struktur) dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan *out group*. Di dunia internasional kita dapat melihat bagaimana konflik dalam bentuk tindakan militer atau di meja perundingan, mampu menetapkan akan batas-batas geografis nasional. Dalam ruang lingkup yang lebih kecil, kita dapat melihat dengan adanya konflik pada saat penggulingan rejim Orde Baru, misalnya dimana dengan kehadiran konflik yang merupakan penjabarannya dalam bentuk chaos secara sengaja digulirkan dengan mengatasnamakan suku, agama, ras dan golongan. Konflik yang tercipta memiliki muatan kepentingan yang sekaligus merupakan suatu kesepakatan pemegang kekuasaan untuk menciptakan kerusuhan-kerusuhan, kondisi *violence* dalam bentuk penjarahan, pemerkosaan, perampokan dan pembunuhan. Hal ini hanya semata-mata dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki oleh Soeharto.

Konflik yang sedang berlangsung dengan *out-group* dapat pula memperkuat identitas para anggota kelompok. Perang bertahun-tahun yang terjadi di Timur Tengah telah memperkuat identitas *in-group* negara Arab dan Israel, atau kaum Protes-

tan dan Katolik di Irlandia Utara. Kelompok keagamaan kelompok etnis dan kelompok politik sering berhasil mengatasi berbagai hambatan karena konflik menjalankan fungsi positif dalam memperkuat identitas *in-group*.

Dalam membahas berbagai situasi konflik, Coser membedakan konflik yang realistik dan yang tidak realistik (Poloma, 1994: 111 – 114). Konflik yang realistik “berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan”. Para karyawan yang mengadakan pemogokan melawan manajemen merupakan contoh dari konflik realistik, sejauh manajemen memang berkuasa dalam hal kenaikan gaji serta berbagai keuntungan buruh lainnya.

Sedangkan konflik yang tidak realistik adalah “konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak”. Seperti contoh dalam masyarakat yang buta huruf pembalasan dendam lewat ilmu gaib sering merupakan bentuk konflik non-realistik: sebagaimana halnya dengan *pengkambinghitaman* yang sering terjadi dalam masyarakat yang telah maju. Dalam hubungan-hubungan antar kelompok, pengkambinghitaman digunakan untuk menggambarkan keadaan dimana seseorang tidak melepaskan prasangka (*prejudice*) mereka melawan kelompok yang benar-benar merupakan lawan dan dengan demikian menggunakan kelompok pengganti sebagai objek prasangka.

Coser pun menegaskan bahwasannya konflik yang diungkapkan dapat merupakan tanda-tanda dari hubungan-hubungan yang hidup, sedang tidak adanya konflik itu dapat berarti penekanan masalah-masalah yang cenderung untuk dilupakan kelak akan menciptakan suasana yang benar-benar kacau. Dan menurutnya konflik juga memi-

liki muatan positif fungsional, sejauh ia memperkuat kelompok dan secara negatif fungsional sejauh ia bergerak melawan struktur (Poloma, 1994: 115 – 117). Dimana konflik secara positif dapat meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok yang memantapkan keutuhan dan keseimbangan, dia menjelaskan dari hasil pengamatan terhadap masyarakat dimana ternyata terdapat adanya hubungan antara peningkatan konflik dalam kelompok dengan peningkatan interaksi dengan dan ke dalam masyarakat secara keseluruhan. Karena homogenitas mungkin penting bagi kelangsungan suatu kelompok terisolir yang berarti konflik internal tidak ada dan hal ini juga dapat berarti lemahnya interaksi kelompok tersebut dengan masyarakat secara keseluruhan. Penekanan yang diutamakan dalam konflik fungsional ini menurutnya adalah penciptaan tipe isu yang sekaligus dijadikan sebagai subjek di dalam konflik itu. Konflik fungsional positif bilamana tidak mempertanyakan dasar-dasar hubungan dan fungsional negatif jika menyerang nilai inti. Coser memakai contoh keluarga, bilamana seseorang melangsungkan perkawinan yang dikarenakan ingin menjadi orang tua, sedangkan pasangannya menginginkan tetap tidak punya anak, maka konflik tentang punya atau tidak punya anak ini menyangkut perjanjian persetujuan mengenai tujuan hubungan itu sendiri.

Dengan demikian jelas bahwa konflik pada pendekatan ini cenderung merusak dan memecah belah tetapi tetap terkait dan memiliki kohesi guna penciptaan keseimbangan kekuatan dan sekaligus dijadikan sebagai sarana bagi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan kondisi pada masyarakat. Pembahasan akan pendekatan tentang hubungan antara konflik dengan struktur sosial dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pendekatan konflik cenderung dis-fungsional bagi struktur sosial dan tidak ada atau tidak terdapatnya toleransi dan

institusionalisasi terhadap konflik. Intensitas konflik yang mengancam nantinya akan mengakibatkan terjadinya suatu penghancuran dan menyerang dasar-dasar kesepakatan sistem sosial yang berhubungan dengan kekakuan atas struktur. Ancaman bagi berlangsungnya kondisi keseimbangan terhadap struktur bukanlah dikarenakan semata-mata dengan hadirnya konflik itu sendiri, melainkan kekakuan yang membiarkan rasa permusuhan terakumulasi dan bila meledak dalam konflik cenderung disalurkan melalui satu jalur utama : perpecahan. (Poloma, 1994: 121-122)

Pada dasarnya penekanan dan penggambaran atas pendekatan konflik yang diajukan oleh Coser sebagai fungsionalisme konflik (*conflict functionalism*) yang tanpa melepaskan konsep-konsep serta asumsi-asumsi fungsionalisme strukturalnya dengan menambahkan konflik yang dinamis, perspektif integrasi dan perspektif konflik bukan merupakan skema penjelasan yang saling bersaing. Melainkan justru dengan adanya konflik, konsensus, integrasi dan perpecahan merupakan satu kesatuan yang utuh di dalam menjalankan suatu proses yang fundamental, walaupun porsi setiap bagian memiliki muatan yang berbeda merupakan bagian kesatuan dari setiap sistem sosial yang berkorelasi.

### C. Suatu Usul Bagi Penjelasan Struktur Sosial (R. Dahrendorf)

Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial, menganggap teori ini merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisa fenomena sosial. Ia pun menganggap masyarakat bersisi ganda memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama (kemudian posisi ini disempurnakan menjadi segala sesuatu yang dapat dianalisa dengan fungsionalisme struktural dan dapat pula dianalisa dengan teori konflik). Percepatan waktu dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat pada abad kesembilan belas yang mana pada masyarakat

industri kecenderungannya mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu antara lain: (1) dekomposisi modal, (2) dekomposisi tenaga kerja (3) timbulnya kelas menengah baru. (Poloma, 1994: 130- 145)

Pemilikan dan kontrol atas sarana-sarana produksi berada di tangan individu-individu yang sama. Kaum industrialis atau borjuis adalah pemilik dan pengelola sistem kapitalis, sedangkan para pekerja atau proletar demi kelangsungan hidupnya tergantung pada sistem ini. Pemisahan antara pemilikan serta pengendalian sarana-sarana produksi mengakibatkan adanya korporasi-korporasi dengan saham-saham yang dimiliki oleh banyak orang dimana tak seorang pun memiliki kontrol yang eksklusif dan berperan sebagai dekomposisi modal. Penspesialisasian seperti memungkinkan sekali seseorang atau beberapa orang untuk memiliki perusahaan tetapi tidak mengendalikannya hal ini dikarenakan tuntutan zaman yang mengharuskan memiliki keahlian dan tenaga kerja spesialisasi. Yang akhirnya manajemen perusahaan dapat menyewa pegawai-pegawai sebagaimana halnya dengan pekerja-pekerja pabrik. Para buruh maupun pegawai kantor dapat memiliki saham perusahaan yang menjadikan mereka sebagai pemilik-pemilik bagian. Menurut Dahrendorf dekomposisi modal ini melahirkan kesulitan untuk mengidentifikasi kaum borjuis yang memiliki monopoli eksklusif atas modal maupun pengendali perusahaan, pemilikan dan pengendalian tersebut mengalami apa yang disebut diversifikasi dan tidak lagi berada dalam tangan satu individu atau keluarga saja.

Kondisi demikian terus berjalan secara berkesinambungan, dan bukan hanya sisi modal saja melainkan juga dekomposisi tenaga kerja. Kaum proletar tidak lagi sebagai suatu kelompok homogen yang tunggal, dimana para buruh terampil berada di jenjang atas sedangkan buruh biasa berada di bawah. Kaum proletar bukan lagi sebagai

massa yang tanpa perbedaan sebagaimana halnya yang terjadi pada kaum borjuis, tukang kayu, tukang pipa serta pengemudi truk memperoleh gaji jauh lebih tinggi daripada pelayan, operator dan sebagainya.

Hal seperti ini akan berdampak pada buruh yang mana nantinya akan menjurus kepada pembekakan jumlah kelas menengah dan memperkuat terjadinya suatu revolusi kelas (Poloma, 1994: 132 – 133). Dimana pada saat revolusi tiba sebagian besar kelompok kecil ini akan bergabung bersama kaum proletar untuk melawan kaum borjuis yang sekaligus terciptanya serikat-serikat buruh yang diikuti oleh mobilitas sosial yang cukup tinggi dari para pekerja. Mobilitas sosial inilah yang nantinya akan merintanggi gejolak revolusi yang terjadi dalam kapitalis modern. Selain itu Dahrendorf menyatakan bawasannya ada dasar baru bagi pembentukan kelas yaitu adanya hubungan-hubungan kekuasaan (*authority*) yang menyangkut bawahan dan atasan, adanya pendikotomian antara mereka yang berkuasa dan yang dikuasai. Dengan kata lain beberapa orang turut serta dalam struktur kekuasaan yang ada dalam kelompok. Tetapi pada dasarnya tetap terdapat dua sistem kelas sosial yaitu : mereka yang berperan serta dalam struktur kekuasaan melalui penguasaan dan mereka yang tidak berpartisipasi melalui penundukan. Perjuangan kelas yang dibahas Dahrendorf lebih berdasarkan pada kekuasaan dari pada pemilikan sarana-sarana produksi. Dalam masyarakat industri modern pemilik sarana produksi tidak sepenting mereka yang melaksanakan pengendalian atas sarana itu.

Secara ringkas penggunaan teori konflik yang dilontarkan oleh Ralf Dahrendorf adalah perjuangan kelas yang terdapat di dalam masyarakat industri, yang mana tidak menekankan pada pemilikan atas sarana-sarana produksi melainkan lebih merupakan pemilikan kekuasaan, yang men-

cakup hak absah untuk menguasai orang lain. Perjuangan kelas dalam masyarakat modern baik dalam perekonomian kapitalis maupun komunis, dalam pemerintahan bebas dan totaliter, berada di seputar pengendalian kekuasaan.

#### D. Konflik Dalam Masyarakat industri

Terlepas dari pendekatan-pendekatan di atas pada hakekatnya semenjak penciptaan hingga perkembangannya manusia cenderung membuat sejarah, tetapi kita tidak pernah bertindak dalam kevakuman, sejarah yang kita buat selalu terjadi dalam suasana interaksi sosial dengan orang lain. Secara hakiki manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu mekanisme pergerakan atas perubahan diawali dari kondisi ini. Pencatatan sepanjang sejarah manusia membuat penciptaan terhadap ciri dan sifat manusia yang selalu menemui konflik (Lauer, 1993: 277-308). Mitology Yunani misalnya pengenalan akan Ares (Dewa Perang) yang dibenci oleh dewa-dewa lain karena sifatnya yang kejam dan gemar bertengkar dan berperang. Berbeda dengan agama besar lainnya di dunia, berperang menurut ajaran agama Budha adalah berperang di dalam diri individu dan menentang hawa nafsu.

Di kalangan orang Babilonia, konflik adalah abadi dan merupakan perjuangan kosmik. Dewa Marduk setiap tahun berperang menentang kekuasaan, kekacauan yang diwakili oleh Dewi Tiamat yang mana perang ini merupakan perang berkepanjangan yang terjadi sebelum dunia tercipta. Adapun konflik-konflik yang terjadi pada tingkat kekuasaan, struktur birokrasi dan strata sosial di dalam masyarakat merupakan perkembangan manusia dalam pengembangan nilai kreatifitas dan inovasinya, dan hubungan antar dua segmen ini sangat erat. Hal tersebut yang nantinya akan menyebabkan perubahan pada struktur (perubahan pada nilai-nilai atau pranata). Seperti yang dikatakan oleh Dahrendoft seorang

sosiolog Amerika, seluruh inovasi dan perkembangan dalam kehidupan individu, kelompok dan masyarakatnya disebabkan konflik antar kelompok, individu dan antara emosi dengan emosi dalam diri sendiri (Lauer, 1993: 281-282).

Perkembangan ilmu pengetahuan menurut jamannya sedikit banyak ikut andil dalam perwujudan perkembangan manusia dan dunia secara global. Pengetahuan atas proses perkembangannya yang diawali dengan gesekan-gesekan antar individu ini (konflik) berimplikasi terhadap pembentukan pola perilaku sosial individu di dalam lingkungan masyarakatnya, dan kompetisi serta persainganlah yang menuntun ke arah perubahan. Adapun bentuk perubahan itu dapat berupa peradaban, kebudayaan, masyarakat, komunitas, institusi, organisasi, interaksi, dan individu. Perubahan-perubahan yang disebabkan adanya kompetisi dan persaingan itu merupakan faktor kreativitas dan inovasi dengan pengertian manusia sebagai individu selalu mengidentifikasi kompetisi sebagai pendorong yang kuat, ganjaran-ganjaran yang dihadapi di dalam hidupnya mengharuskan individu untuk mendasari pelaksanaan pada bentuk pekerjaan (Lauer, 1993: 284).

Perebutan-perebutan lahan pekerjaan itu dapat dijadikan sebagai contoh bahwasannya manusia ingin berkompetisi untuk saling mengalahkan dan mendapatkan bagian yang maksimal dari ganjaran-ganjaran kebersamaan mereka. Dengan kata lain konflik antar kelompok dapat terlihat dari sudut konflik tentang keabsahan hubungan kekuasaan yang ada. Jika pendekatan di atas diturunkan pada tingkat kemasyarakatan dalam hal ini lingkungan masyarakat buruh sebagai hasil dari sebuah organisasi industri, dimana perusahaan industri adalah sebuah kelompok kekuatan atau *imperatively coordinated group* yang mana perusahaan ini memiliki hirarki kekuasaan yang ditandai dengan buruh di bawah (tingkat kekuasaan

terendah) dan beberapa tingkat pimpinan (manajemen) di atasnya. Kekuasaan manajemen adalah sah dan dipertahankan melalui berbagai sanksi (penurunan pangkat, pemecatan dan sebagainya). Oleh karena itu terdapat konflik kepentingan yang melekat antara manajer dan buruh. Dengan adanya perbedaan muatan kepentingan antara kedua kelompok tersebut yakni kelompok kepentingan majikan dan kelompok kepentingan buruh mengakibatkan terbentuknya mekanisme konflik yang secara kondusif akan menghasilkan perubahan secara struktural dalam organisasi industri dan dalam posisi relatif di lingkungan masyarakat buruh. Kondisi demikian merupakan perwujudan dari pergesekan yang sifatnya vertikal dimana kepentingan kelompok majikan dalam menentukan sistem kebijaksanaan, nilai upah dan pembagian jam kerja. Selain itu gesekan-gesekan yang sifatnya vertikal ini selalu mengesampingkan kekuatan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan di organisasi industri itu. Dikarenakan adanya hubungan yang signifikan antara kekuasaan kepentingan konflik itu sendiri dengan kekuasaan. Dengan kata lain kekuatan kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang saham misalnya menentukan di dalam penentuan kebijaksanaan-kebijaksanaan di organisasi industri tersebut atau pabrik.

Pengesampingan-pengesampingan yang terjadi pada tingkat pemegang kekuatan kekuasaan itu akhirnya berimbas pada lapisan yang ada di tingkat bawah. Dimana kekuatan buruh pada kondisi ini sama sekali tidak terlihat atau bahkan ditutupi oleh adanya muatan nilai produksi yang cukup tinggi. Kecenderungan akan hasil produksi yang cukup tinggi ini seakan-akan menjadi prioritas pertama di dalam penentuan kelangsungan organisasi industri. Kondisi yang tidak kondusif sekaligus perlakuan yang condong pada pengeksploitasian ini tanpa disadari akan menciptakan perubahan secara revolusioner di tataran masyarakat

buruh. Pembentukan hubungan kolektivitas dan penyeragaman pola perilaku serta penciptaan kompetitif di lingkungan kerja merembes ke dalam kehidupan bermasyarakat. Dan tanpa adanya pengolahan yang sifatnya akademik. Dengan demikian perbedaan-perbedaan yang dimiliki dan terpendam oleh hasil kekuasaan terkadang terlampirkan untuk memenuhi hasrat yang terkekang. Di dalam pemenuhan hidupnya selalu mengimpikan kelayakkan seperti yang lain dan serasa terlepas dari aturan-aturan yang mengikatnya. Pemenuhan akan tingkat produksi dan jasa-jasa atas ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pihak pabrik kerap kali tidak selalu diimbangi oleh pemenuhan akan kebutuhan hidup yang dapat dikatakan sebagai bentuk lain yang harus dimiliki oleh para pekerja pabrik (buruh) Pemenuhan akan kebutuhan merupakan kebutuhan mendasar yang dimiliki oleh setiap orang, pencerminan pemikiran atas hak dan kewajiban seseorang harusnya dapat terlihat ketika tugas yang dilakukan oleh pekerja sudah terpenuhi seharusnya pulalah diimbangi oleh imbalan atas tugas itu yang mana merupakan bentuk atas hak segenap pekerja. Terlepas dari itu semua, pada hakekatnya di dalam setiap menjalankan proses produksi terdapat tiga faktor yang tidak dapat diabaikan, yaitu alam, modal dan tenaga kerja. Ketiga faktor ini dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil produksi dan jasa-jasa, sekaligus mendapat perhatian atau imbalan yang seimbang yang dengan sumbangan yang diberikannya. Kita berhak mengolah segala bentuk sumber-sumber alam, namun kita juga berkewajiban pula untuk memelihara kelestariannya. Janganlah menebang hutan dengan semena-mena karena akan menimbulkan erosi atau pengotoran udara yang akan menimbulkan krisis ekologi dan mengganggu keseimbangan alam itu sendiri.

Demikian pula halnya dengan tenaga kerja manusia itu sejak lahir berhak menikmati hasil-hasil produksi. Seperti makanan,

pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Setelah ia mencapai usia tertentu manusia itu wajib bekerja (Trimurti, 1976). Sesuai dengan martabat kemanusiannya, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, "setiap warganegara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak..." Kalau kita mau konsekwen ingin melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 itu, maka tenaga kerja dan/atau buruh itu berhak pula menerima imbalan dari sumbangannya dalam proses produksi dalam bentuk upah, jaminan sosial, jaminan hari tua dan perlindungan waktu melaksanakan pekerjaan. Umpamanya, pengusaha hutan seharusnya menyampaikan keterangan tentang, hilangnya seorang buruh di tengah hutan belantara atau buruh yang mati tertimpa runtuh waktu pembangunan gedung-gedung. Dalam hal ini pengusaha wajib memberikan uang atau apapun namanya kepada keluarga yang tertimpa musibah itu. Terhadap buruh wanita, penguasa atau majikan wajib menjaganya agar pengusaha atau majikan wajib menjaganya agar dalam bekerja fungsi biologisnya sebagai wanita tidak terganggu.

Pemenuhan akan tingkat hidup yang terkadang tidak terpenuhi oleh penghasilannya sebagai buruh pabrik dan adanya perbedaan penghasilan antar sesama pekerja buruh pabrik yang diluar perkiraan dikarenakan adanya perbedaan latar pendidikan dan penguasaan ketrampilan dapat mengakibatkan kondisi kekerasan di lingkungan masyarakat (adanya gesekan-gesekan yang sifatnya horizontal), seperti pencurian, intrik-intrik sosial yang kecenderungannya selalu melihat persaingan dalam bentuk material yang akhirnya berkelanjutan menjadi sentimental sosial.

#### **E. Penutup : Hubungan Kekuasaan Menyebabkan Perubahan Struktural**

Pada akhirnya dengan adanya konflik kelas (konflik mengenai hubungan kekuasaan atau yang muncul di luar hubungan kekuasaan) menyebabkan adanya peruba-

han secara struktural (perubahan nilai atau aturan sosial pada masyarakat). Pergesekan-pergesekan seperti ini merembes akibat dari adanya hubungan kekuasaan. Pada masyarakat buruhpun demikian, dimana hasil dari kekuatan industri membuat corak pada lingkungan masyarakat identik dengan kekerasan. Akibat dari adanya kekuatan kekuasaan yang menimbulkan konflik baik yang vertikal atau horisontal. Dan keadaan demikian didukung oleh pernyataan Dahrendorf, yakni:

1. Setiap masyarakat dalam segala hal tunduk pada proses perubahan, dan perubahan itu dapat terjadi dimana saja.
2. Setiap masyarakat dalam segala hal memperlihatkan ketidaksesuaian dan konflik, dan konflik sosial ada dimana saja.
3. Setiap unsur dalam satu masyarakat memberikan kontribusi terhadap perpecahan dan perubahannya.
4. Setiap masyarakat berdasarkan atas penggunaan kekerasan oleh sebagian anggotanya terhadap anggota lain. (Lauer, 1993: 281-282; Poloma, 1994: 115-117)

Namun tanpa disadari bawasannya penciptaan perubahan yang ada juga seiring dengan perubahan yang ada di dalam struktur masyarakat itu sendiri. Sama halnya dengan kondisi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tidak diimbangi dengan pertumbuhan akan penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sumber daya manusia seutuhnya. Hal inilah yang terabaikan dalam proses industrialisasi yang bercorak developmentalis. Dimana pembangunan di sentra-sentra industri yang memunculkan pabrik-pabrik sebagai tempat lapangan kerja bagi para pekerja (buruh) juga menimbulkan perubahan kebudayaan di dalam masyarakatnya, peralihan mata pencarian, pandangan hidup serta pola perilaku yang tercipta di dalam hubungan masyarakat sekitarnya (buruh) secara progresif dan revolusioner ikut mengalami perubah-

an seperti ucapan yang dilontarkan oleh Marx bahwasannya revolusi adalah penting. Baik untuk menghancurkan tatanan sosial yang ada yang tidak rasional maupun untuk membersihkan mereka yang telah ditindas oleh tatanan yang ada itu (Lauer, 1993: 294-297). Kekerasan mungkin menjijikkan bagi orang yang hidup enak dan makmur, tetapi bagi orang yang tertindas, kekerasan merupakan palu untuk menghancurkan rantai yang membelenggu mereka. Kekerasan yang terjadi ini seperti halnya yang terjadi pada komunitas masyarakat buruh, dimana kekerasan yang mereka dapat di dalam kehidupannya yang dirasakan selalu saja tidak pernah lepas dari kungkungan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemilik modal (boss), kerap kali kekerasan secara fisik di dunia pekerjaannya sebagai buruh selalu saja dirasakan seperti misalnya; pelecehan seksual, perkataan (cacian kasar) dan bahkan cacian yang sifatnya penekanan secara psikologis. Semua itu merupakan bagian dari kehidupan sebagai pekerja buruh dan selalu tidak bisa dihindari seakan-akan selalu melekat di dalam hidup dan pandangan matanya.

Kekerasan terjadi bila antar setiap manusia melakukan hegemoni terhadap orang lain, proses hegemoni dalam bentuk mempengaruhi satu dengan yang lainnya dalam bentuk demikian rupa. Sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya (Windhu, 1992: 111-112). Realisasi potensial adalah apa yang memang mungkin direalisasikan sesuai dengan tingkat wawasan, sumber daya dan kemajuan yang sudah dicapai pada jaman-nya. Penyalahgunaan sumber-sumber daya dan hasil-hasil perkembangan atau pembangunan untuk tujuan lain atau "dimonopoli" oleh segelintir orang atau kelompok saja, maka terjadi kekerasan dalam suatu sistem. Membiarkan penderitaan penyakit atau bencana yang diderita sebagian besar rakyat bawah, padahal sebenarnya bisa diatasi.

Kondisi kekerasan yang nampak inilah yang secara implisit dapat diuraikan bahwa sebenarnya kekerasan merupakan suatu bentuk yang memiliki kekuatan dan adanya unsur paksaan dan tekanan. Dengan demikian, akhirnya dapat diklasifikasikan beberapa dimensi mengenai kekerasan, antara lain :

1. Kekerasan fisik dan psikologis

Dalam kekerasan fisik tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan bisa sampai pada pembunuhan. Di sini jelas bahwa kemampuan somatis seseorang yang mengalami kondisi ini otomatis berkurang atau hilang sama sekali. Sarana transportasi yang tidak merata, yang terakumulasi pada orang-orang atau tempat tertentu dan memperjelas adanya mobilitas dan mengurangi aktualisasi potensi jasmani. Demikian juga memencarkan atau merantai. Sekaligus mengurangi kemampuan jiwa (rohani) seseorang. Sama halnya dengan kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan yang dimaksudkan mereduksi kemampuan mental atau otak atau dengan kata lain adanya kerusakan pada *hurt* dan *hit*.

2. Pengaruh positif dan negatif

Seseorang dapat dipengaruhi tidak hanya dengan melakukan hukuman, tetapi juga dengan memberi imbalan (*reward oriented*). Yang mana dalam sistem imbalan sebenarnya terdapat pengendalian, tidak bebas kurang terbuka dan cenderung manipulatif. Meskipun demikian selalu memberikan kenikmatan dan *euphoria*.

3. Ada objek atau tidak

Kekerasan dapat terlihat secara gamblang dan jelas jika memang memiliki tempat untuk mengaktualisasikannya. Bila tidak memiliki objek fisis atau biologis tidak dapat dikatakan sebagai kekerasan. Proses kekerasan yang berlangsung selalu menimbulkan efek ancaman kekerasan fisik dan psikologis.

4. Ada subjek atau tidak

Kekerasan dapat terlihat secara jelas pula jika ada person yang melakukan tindakan atas kekerasan tertentu. Suatu kekerasan dapat disebut langsung atau personal jika ada pelakunya, dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung (Lubis, 1988: 45-51). Disini jelas perbedaannya bahwa dampak atau akibat dari kekerasan langsung dapat dilacak pelakunya (manusia konkrit). Namun kekerasan struktural sulit untuk menemukan pelaku manusia konkrit. Dan jika terdapat kondisi demikian, maka kekerasan sudah merupakan bagian dari struktur (strukturnya jelek). Kondisi yang demikian (struktur yang jelek) menciptakan situasi-situasi yang negatif. antara lain seperti adanya ketimpangan atas sumberdaya, pendapatan, kepandaian, pendidikan, serta wewenang untuk mengambil keputusan.

5. Disengaja atau tidak

Perbedaan penting ketika orang harus mengambil keputusan mengenai "kesalahan" yang dikaitkan dengan tujuan dari pada akibat dari tindakan. Menurut pendefinisian Galtung ingin mengungkap berbagai kemencengan atas pemahaman mengenai kekerasan, perdamaian serta sistem etika yang dimaksudkan untuk memerangi kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Pemahaman yang hanya menekankan unsur sengaja ini tentu tidak cukup untuk melihat, mengatasi kekerasan struktural yang bekerja dengan halus dan tidak disengaja. Bila tindakan itu diarahkan untuk perdamaian maka terlalu sedikit yang dapat dijangkau. Maka dari itu Galtung memberikan perspektif yang agak luas dengan melibatkan unsur ketidaksengajaan, serta yang menyangkut nasib banyak orang. Jadi dengan demikian tindakan yang diarahkan untuk perdamaian berarti

diarahkan untuk menentang kekerasan secara langsung dan tidak langsung (struktural). Karena, dilihat dari sudut korban, sengaja atau tidak kekerasan itu tetap kekerasan.

6. Yang nampak dan tersembunyi

Kekerasan yang nampak atau nyata (manifest), baik yang sifatnya personal maupun structural, dapat terlihat secara tidak langsung. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (laten), tetapi bisa dengan mudah meledak. (Windhu, 1992: 67-72)

Dengan demikian kondisi kekerasan yang sekaligus menjadikan reaksi atas perubahan secara berangsur-angsur dapat terus bergulir dan tanpa sadar telah menciptakan proses eksploitasi, marginalisasi, ketimpangan dan ketidakadilan terhadap kaum yang ditindas (kaum buruh). Pergolakan-pergolakan yang tercipta memang merupakan pencerminan atas kondisi alam yang demokratis. Penyelewengan-penyelewengan atas hak manusia tersebut memang menghadirkan peta konflik antara buruh (tingkat kekuasaan terendah) dengan kelompok pemilik kekuasaan seperti pemerintah, pemilik saham/modal di dalam sebuah organisasi industri, yang pada akhirnya menciptakan adanya gerakan-gerakan sosial sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan atas tuntutan demokratisasi (Budiman, 1996: 81-91).

Pada hakekatnya manusia adalah makhluk yang bebas, memiliki akal budi dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Tetapi dengan kehadirannya pula manusia ditindas oleh kekuasaan yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Dimana penciptaan sistem yang kapitalistik di dalam organisasi industri itu justru menindas dan menjadikan manusia sebagai bahan untuk melakukan kompetitif terhadap manusia lainnya. Hal ini merupakan pencerminan dari adanya

kehadiran pembangunan yang mana di dalam perwujudannya tidak terlepas dengan kehadiran teknologi guna pencapaian percepatan dari hasil yang akan dimuat dalam bentuk nilai-nilai ekonomis (Capra, 1997: 321-324). Padahal perkembangan pembangunan bukan hanya melibatkan pertumbuhan dan ekonomis belaka. Tetapi tidak terlepas dengan pertimbangan segi-segi sosial, politik dan nilai-nilai kebudayaan yang merangkul menjadi satu dan membentuk kristal integritas nasional. Adapun dalam pencapaian proses integrasi itu sendiri perlu dilakukan suatu perencanaan atau strategi guna mencapai perubahan sosial secara global (*The International Development Strategi*) (Sachs, 1995: 17-24).

Perencanaan strategi itu harus didasarkan pada kegiatan/aksi yang terpusat di dalam semua wilayah ekonomi dan kehidupan sosial. Strategi-strategi itu bermuatan komponen-komponen ekonomi dan sosial di dalam perancangan pola pembangunan, antara lain :

1. Tidak satupun kependudukan berada di luar dari lingkup perubahan dan pembangunan
2. Mengakibatkan perubahan struktural yang demi kepentingan nasional dan mengaktifkan semua sektor penduduk untuk berpartisipasi di dalam proses pembangunan.
3. Menuju ke persamaan sosial, termasuk pencapaian pembagian pendapatan dan kesejahteraan yang merata di dalam suatu bangsa.
4. Memberikan prioritas tinggi kepada pembangunan potensi manusia dan penyediaan peluang kesempatan kerja dan pemenuhan kebutuhan. (Sachs, 1995: 19-21)

Oleh karena itu tidak mengherankan jika kondisi yang ditemukan di lapangan cenderung terlihat terjadinya kemajuan pembangunan yang diiringi oleh pertumbuhan yang cukup tinggi, dan seringkali harus dibayar dengan memarjinalkan lapisan masyarakat bawah dalam hal ini buruh baik dalam peran politiknya maupun hak-hak sosial ekonominya. Persoalan ini sudah menjadi problematika pada negara-negara Dunia Ketiga. Disamping itu pula pengkritisan yang terjadi dalam bentuk suatu pergerakan yang dilakukan oleh kaum buruh untuk berjuang demi peningkatan kesejahteraan sering ditanggapi oleh pengusaha sebagai suatu gerakan mengganggu pembangunan dan stabililas dan sebab itu harus dihindari dengan cara-cara yang terkadang kurang sesuai dengan etika, moral dan hukum yang berlaku, bahkan terkesan represif. Kondisi yang demikian yang juga memicu semakin progresnya perjuangan yang dilakukan oleh kaum buruh, dimana penyikapkan yang diterapkan terkadang juga bersindrom akan kekerasan. Disinilah posisi kita sebagai kaum intelektual harus dapat memberikan pandangan dan menjembatani untuk menuju pemikiran yang jernih dan objektif.

Posisi yang tercipta di dalam lingkungan masyarakat itu saling bergesekan erat dan tidak pernah akan berkorelasi, dikarenakan pihak pengguna kepentingan dalam hal ini pemegang kekuasaan dan pemilik modal tidak menempatkan porsinya secara benar, serta penggunaan wewenang yang berlebihan dan kekuatan kekuasaan yang dominan ini.

## Daftar Pustaka

- Budiman, Arif. *Dimensi Kritik Proses Pembangunan Di Indonesia, Gerakan Sosial, Demokrasi Di Indonesia*. Kanisius. Yogyakarta. 1996.
- Cakra, Fritjof *Titik Balik Peradaban, Sisi Gelap Pertumbuhan*, Yayasan Bentang Budaya, Jakarta. 1997.
- Lauer, Robert H. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Renika Cipta. Jakarta. 1993.
- Lubis, Mochtar. *Menggapai dunia damai*, Jakarta. Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Sachs, Wolfgang. *Kritik atas pembangunanisme. Telaah Pengetahuan Sebagai Alat Penguasaan, Inflasi Konseptual Pembangunan di Dunia Ketiga* . CPSM 1995.
- Trimurti, S.K. *Hak dan kewajiban kaum buruh harus seimbang*, Prisma No.9 September 1976 Tahun V, LP3ES.
- Windhu, I Marsana. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut J Galtung* . Kanisius, Yogyakarta, 1992.



# KE(TIDAK)ADILAN SOSIAL DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN

## SOCIAL (IN)JUSTICE IN EDUCATIONAL POLICY

Asal Wahyuni Erlin Mulyadi  
Ilmu Administrasi Negara  
FISIP Universitas Sebelas Maret

### **Abstract**

*The social justice framework offers an alternative rationale for educational policy emphasizing on quality of education. Approach of social justice provides a useful starting point for re-conceptualizing educational policy towards education for all (EFA). The paradigm proposed is the idea of inclusion. It is argued that inclusion in education is a step towards social justice. However, providing EFA that is truly inclusive demands a huge investment. There seems to be significant quantitative improvement, however the issue of equity and quality, not to mention access of those marginalized society in the education system, seems to be staggering. In facts, policy and laws related to inclusive education are rarely implemented in full. This paper develops an understanding of how social (in)justice can be understood in relation to the extent of educational policy which fosters individuals and society in general have reason to value.*

**Key words:** Educational policy, Social Justice, Inclusion Paradigm

### **A. Pendahuluan**

Di Indonesia, sesuai dengan amanat konstitusi negara, semua warga negara berhak memperoleh pendidikan bermutu. Namun demikian, data Depdiknas tahun 2009 menunjukkan bahwa sekitar 2,2 juta anak usia wajib belajar (usia 7-15 tahun) belum dapat menikmati pendidikan. Total sekitar 28,4 juta warga usia 7-25 tahun tidak memperoleh pendidikan (Kompas, 11/12/2009). Jika jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 250 juta jiwa, maka berarti lebih dari 10% penduduk yang tidak “terjamah” oleh amanat konstitusi tersebut.

Beragam berita “tragis” tentang dunia pendidikan di Indonesia benar-benar merupakan suatu keprihatinan (dengan tidak berarti tidak bangga atas berbagai prestasi yang telah dicapai). Demonstrasi guru, perilaku anarkis peserta didik, banyaknya anak putus sekolah, serta ditolaknya siswa di be-

berapa sekolah karena kebutuhan khusus yang dimiliki merupakan kondisi nyata yang menggambarkan kerapuhan dunia pendidikan di Indonesia. Hal ini secara tidak langsung telah berdampak terhadap krisis multidimensional dalam segala aspek kehidupan. Sebagai akibatnya, berbagai bentuk patologi sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini.

Pendidikan bagi semua yang merupakan hak dari setiap warga negara masih menjadi suatu impian. Memang mencapai pendidikan bagi semua bukan semudah membalikkan telapak tangan. Pendidikan bagi semua memerlukan “huge investments”. Suatu langkah dalam menyikapi kondisi tersebut adalah dengan melakukan koreksi terhadap segala bentuk ketidakadilan sosial dalam setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan. Perspektif keadilan sosial dalam setiap tindakan pemerintah

sangat diperlukan agar tidak terlepas dari koridor amanat konstitusi negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Tikly dan Barrett (2011) bahwa:

*“a social justice approach is and can provide a new way of thinking about and an alternative rationale for education rooted in individual freedoms and education’s role in fostering capabilities that encompasses but also stretches and challenges human capital and rights approaches”.*

## B. Pendidikan dan Keadilan Sosial

Tilaar dan Nugroho (2008), mengutip pendapat John Dewey, mengemukakan bahwa untuk menciptakan masyarakat yang demokratis adalah dengan mendemokratisasi pendidikan. Masyarakat demokrasi sebagai masyarakat terbuka terbentuk karena adanya kekuatan individu yang berkembang dari pengalaman dan partisipasi dalam hidup bersama. Dengan demikian aspek pendidikan turut menentukan perubahan sosial yang terjadi pada individu maupun masyarakat. Seperti diungkapkan oleh Pitt (1998) bahwa

*“the way towards a more socially just society is related to the assimilation of the hyper individual with the social group. A shift to a culture where the individual’s rights and responsibilities are respected within a social whole, resulting in the emergence of the socially responsible individual. ...it is an approach which leads away from the hyper individualism towards social responsibility and a culture where trust and honour along with dignity are central themes”.*

Aspek pendidikan juga terkait erat dengan politik, yaitu politik pendidikan. Politik pendidikan merupakan *policy* yang ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia untuk mewujudkan tujuan pembangunan bangsa melalui pembangunan pendidikan, menurut Rohman dan Wiyono (2010) dirumuskan dalam kebijak-

an pendidikan yang akan berakres antara lain pada *equality of opportunity, accessibility, equality*, dan *equity*. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat 1 yang menyatakan “bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

Pendidikan bagi semua (*Education for All - EFA*) merupakan tujuan dari kebijakan pendidikan. Tentu saja pendidikan bukan satu-satunya aspek yang menentukan. Pendidikan terkait erat dan mempunyai hubungan yang sangat kompleks dengan pemerataan atau keadilan. Keadilan sosial secara formal merupakan aspirasi utama yang terkandung dalam konstitusi negara Indonesia, UUD 1945. Dengan kata lain, keadilan sosial merupakan norma pokok dalam kehidupan bermasyarakat bangsa mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Hakikat pendidikan adalah memandu peserta didik ke arah realita sosial, artinya berintegrasi secara holistik dengan kondisi masyarakat yang heterogen serta tidak mengarahkan pada eksklusifitas (Mulyadi, 2010). Kebijakan pendidikan harus dapat mengakomodir tantangan pluralisme dengan kekayaan heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia. Keterpaduan segenap individu luruh dalam suatu kelompok sosial dengan menghormati segala perbedaan yang ada merupakan kondisi keadilan sosial yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, untuk mengurangi ketidakadilan juga ditentukan keputusan-keputusan politik terkait segala aspek kehidupan. Tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap upaya pembenahan sistem, akan muncul permasalahan-permasalahan lainnya. Ketidakadilan sosial (termasuk dalam bidang pendidikan) juga akan mempengaruhi pembangunan nasional. Hal ini seba-

gaimana dikemukakan oleh Wils et al (dalam Tikly dan Barrett, 2011) bahwa *“it is argued from a human capital perspective that countries which have the highest levels of inequality (of any kind) in the education sector also have the slowest national growth rates”*.

### C. Komersialisasi dan Kastanisasi dalam Pendidikan

Ungkapan “orang miskin di larang sekolah” bukan suatu jeritan kosong. Hal itu berdasar pada kenyataan tentang betapa mahalnya biaya pendidikan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat. Pendidikan yang diharapkan mengentaskan kemiskinan hanyalah mimpi belaka karena orang miskin dilarang sekolah. Pemerintah telah mengorientasikan pendidikan pada komersialisasi dengan *“market oriented”*. Terkesan bahwa pemerintah melalaikan (kalau tidak dikatakan melupakan) tanggungjawab dalam bidang pendidikan yang adil dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat.

Fenomena komersialisasi pendidikan ini juga diperkuat dengan pergeseran otonomisasi pendidikan ke arah privatisasi (swastanisasi) pendidikan. Bukan merupakan hal yang “aneh” apabila saat ini lembaga-lembaga pendidikan memiliki “kewenangan” untuk mencari sumber dana dan mengelola dana secara mandiri yang pada akhirnya akan menuju pada apa yang disebut sebagai “kapitalisme pendidikan”. Kapitalisme pendidikan, menurut Wahono (2001), akan mengakibatkan eliminasi bagi beberapa kelompok masyarakat untuk mencapai keadilan dalam akses pendidikan.

Pada saat yang sama, pemerintah telah meng-kastanisasi pendidikan dengan membagi sekolah dalam beberapa kelompok. Kelompok-kelompok sekolah yang ada saat ini adalah sekolah bertaraf internasional (SBI), rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), sekolah kategori mandiri, sekolah standar nasional, dan sekolah reguler. Munculnya SBI dan RSBI didasari UU No

20/2003 Pasal 50 ayat 3 bahwa “pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan jadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.

Data Kemendiknas tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah RSBI tingkat SD adalah 136 sekolah, SMP adalah 300 sekolah, SMK adalah 118 sekolah, dan SMA 320 sekolah (Kompas, 26/5/2010). Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa secara nyata tercipta kasta-kasta dalam dunia pendidikan saat ini dalam segala tingkatan. RSBI dan SBI merupakan kasta tertinggi dalam dunia pendidikan saat ini, khususnya pendidikan tingkat dasar sampai tingkat menengah. Warga negara yang bisa “masuk” menjadi bagian dari kasta tertinggi ini adalah mereka yang “ber-uang”. Biaya masuk SMP dan SMA, bahkan SD berbunyi jutaan rupiah, belum termasuk biaya bulanan.

Peng-kotak-an yang berakibat kastanisasi dalam pendidikan ini sebenarnya juga dapat dilihat dengan adanya segregasi sistem pendidikan dengan adanya sekolah reguler dan sekolah khusus (terutama bagi peserta didik berkebutuhan khusus – SLB). Jika konstitusi negara mengamanatkan bahwa setiap individu dengan segala kondisi yang melekat pada dirinya mempunyai hak yang sama dalam pendidikan, mengapa ada perbedaan sekolah? Beragam persoalan ketidakadilan muncul sebagai akibat dari adanya kebijakan “peng-kotak-an” ini. Padahal, katanya, adanya SBI dan RSBI diharapkan tidak membuat masyarakat eksklusif dan memprioritaskan kemampuan akademik siswa. Harapan ini akan tetap menjadi harapan ketika system yang ada tetap dilakukan secara eksklusif.

### D. Wacana Inklusi dalam Kebijakan Pendidikan

Menurut Subarsono (2008) dalam memilih alternatif kebijakan publik, salah satu

variabel yang perlu dipertimbangkan yaitu “mampu mempromosikan pemerataan dan keadilan pada masyarakat”. Artinya kebijakan publik harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan bersifat adil. Rohman dan Wiyono (2010) mengemukakan bahwa keseluruhan kebijakan pendidikan di Indonesia belum membuahkan hasil yang optimal, ditandai dengan masih banyaknya distorsi dan “keganjilan” penyelenggaraan pendidikan. Kastanisasi dan komersialisasi pendidikan menunjukkan ketidakadilan dalam kebijakan pendidikan. Tingginya jumlah warga negara yang tidak dapat menikmati pendidikan telah menyimpulkan ketidakadilan dalam bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan lemahnya peran pemerintah dalam mengemban dan mewujudkan amanat konstitusi.

Pendidikan merupakan bagian kebutuhan mendasar setiap warga negara serta merupakan bagian dari proses sosial. Peserta didik disebut sebagai pembawa perubahan (*agent of change*). Oleh karena itu apa (ke arahmana) dan bagaimana perubahan dapat terjadi ditentukan oleh model sistem pendidikan serta landasan ideologi dari pendidikan itu sendiri. Beberapa pemerhati pendidikan mengemukakan bahwa sistem pendidikan yang berdasar pada ideology sekularistik-kapitalistik atau sosialisme-komunisme akan melahirkan masyarakat sekuler-kapitalis atau sosialis-komunis. Ditambahkan oleh Rohman dan Wiyono (2010) bahwa pendidikan dengan perspektif ekonomi akan melahirkan generasi yang berorientasi individualis, materialis, dan liberalis.

Perspektif inklusi berorientasi pada perwujudan keadilan sosial. Paradigma inklusi berdasar pada nilai-nilai demokratis dan non diskriminasi. Booth (2005, dalam Polat, 2011) menyatakan bahwa “*inclusion is a philosophy based on values aiming to maximize the participation of all in society and education by minimizing exclusionary and discriminatory practices*”. Dalam kebijakan pendidik-

an, wacana inklusi menentukan tercapainya keadilan sosial. Sebagaimana di kemukakan oleh Polat (2011) bahwa “*inclusion in education is a step towards social justice*”. Dengan kata lain, paradigma inklusi tidak hanya akan meningkatkan kualitas suatu kebijakan (termasuk kebijakan pendidikan), tetapi juga menepis ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

## E. Penutup

Pendidikan merupakan tumpuan suatu bangsa mencapai masa depan yang dicita-citakan. Keberhasilan bidang pendidikan akan terkait erat dengan keberhasilan pembangunan bidang lainnya, termasuk ekonomi dan politik. Keberhasilan pembangunan dalam segala aspek turut ditentukan oleh kebijakan pemerintah sesuai dengan bidangnya. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan adalah kebijakan pendidikan.

Kehidupan bangsa yang cerdas dan kepekaan terhadap realitas social sebagai wujud hasil bidang pendidikan masih menuai kritik yang belum berujung, dibalik prestasi atas beberapa keberhasilan yang telah dicapai. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi dunia pendidikan harus dilakukan pendekatan yang integratif. Perlu *a new way of thinking* terhadap paradigma dan pokok-pokok penopang sistem pendidikan.

Dalam hal ini, fokus pada keadilan sosial ditawarkan sebagai kunci utama. Paradigma inklusi dalam setiap kebijakan publik akan mewujudkan tujuan pembangunan bangsa yang ber-keadilan sosial. Dalam bidang pendidikan dikemukakan bahwa “*inclusion in education is a step towards social justice*”. Dengan kata lain, paradigma inklusi dalam kebijakan pendidikan akan menciptakan keadilan sosial, sesuai dengan amanat konstitusi negara.

## Daftar Pustaka

- Mulyadi, Asal Wahyuni Erlin Mulyadi. 2010. Mewujudkan Masyarakat Madani Melalui Pendidikan Inklusif. Prosiding Seminar Nasional: Pengembangan Ilmu Sosial, Humaniora, dan Pendidikan untuk Membangun Karakter Bangsa. Surabaya: Unesa University Press.
- Polat, Filiz. 2011. Inclusion in Education: A Step towards Social Justice. *International Journal of Educational Development* 31 (1): 50–58
- Pitt, Jane. 1998. Social justice in education in 'new times'. Paper delivered for Annual Conference of Australian Association for Research in Education. Terdapat pada <http://www.aare.edu.au/98pap/pit98177.htm>. Diakses tanggal 28 Desember 2010.
- Rohman, ArifdanWiyono, Teguh. 2010. Education Policy in Decentralization Era. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono, AG. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tilaar, H.A.R dan Nugroho, Riant. 2008. Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tikly, Leon dan Barrett, Angeline M. 2011. Social Justice, Capabilities and the Quality of Education in Low Income Countries. *International Journal of Educational Development* 31 (1): 3–14
- Wahono, Francis. 2001. Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetisi dan Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar



# SIMBOL-SIMBOL KOMUNIKASI DALAM PEMILUKADA JAWA TENGAH 2008

Bambang Santosa  
Sosiologi  
Universitas Sebelas Maret

## **Abstract**

*This qualitative descriptive research is intended to investigate communication symbols that are used in the election of the candidate of province head in Central Java in the year of 2008. Based on some considerations, Klaten Regency as one of the regency in Central Java is selected as the research site, Central points of this research are: (1) understanding the shapes and forms of communication symbols used in the campaign; (2) the background of the using of those communication symbols; (3) studying community members' understanding upon those communication symbols; and (4) investigating community behavior concerning the election of the candidates of both the governor and the vice governor. Interactive analysis model using three components of analysis i.e. data reduction, data display and conclusion drawing and verification is used in this research. Research result indicates that there is influence of communication symbols in the shape of the photographs of both candidates of governor and of vice governor. It means that the decision of electing the governor and vice governor is affected by communication symbol mainly the color of the background of those photographs. Other research result also indicates that the decision to elect the candidates is influenced by priority model, kinship relation is the first priority, political party relation is the second priority, and the origin is the third priority.*

**Key words** : communication symbols, candidates, campaign.

## **Pendahuluan Latar Belakang**

Pada masa era demokrasi seperti pada saat sekarang, proses pemilihan kepala daerah diselenggarakan melalui pemilihan secara langsung.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan, realitas masyarakat cenderung ingin mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi tersebut melalui pemilukada secara langsung. Proses pemilihan secara langsung merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat, karena pada dasarnya kekuasaan hakekatnya milik rakyat dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, sehingga nilai yang menyatakan "suara rakyat adalah suara Tuhan" menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Semenjak diterapkannya Undang-undang N0: 12/2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 56 jo, pasal 119 dan Peraturan Pemerintah N0 : 6/2005 tentang tata cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sampai saat sekarang telah beberapa kali dilaksanakan pemilukada, baik tingkat kabupaten kota maupun tingkat I. Sampai pada tahun 2007 tercatat telah 323 kali dilaksanakan pemilukada.

Berdasar jajak pendapat yang diberitakan Harian Kompas senin 18 Februari 2008 dari 893 pemilik telpon di beberapa wilayah Indonesia, sekitar 8 dari 10 responden yang daerahnya telah melaksanakan pemilukada menyatakan puas atas hasil pemilukada tersebut. Mayoritas responden mendukung pelaksanaan pemilukada

(87,6%) secara langsung. Dari responden tersebut sebesar 61,5 % menyatakan bahwa pemilukada dapat memberi ruang bagi partisipasi langsung yang lebih luas atau lebih demokratis. Namun ada satu hal yang dikhawatirkan banyak orang adalah pelaksanaannya. Pada kasus-kasus tertentu terdapat oknum panitya yang nakal, kurang jujur, tidak adil dan tidak objektif, sehingga rentan terhadap tumbuhnya konflik sosial dalam masyarakat. (Kompas 18 Feb. 2008,hal 5).

Di dalam pemilukada beberapa daerah tampak meriah karena dipasang beberapa gambar foto kandidat calon kepala daerah dan wakilnya. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara calon yang memiliki dana besar dan didukung oleh partai politik besar dibanding dengan calon yang hanya modal kecil.

Dalam penggunaan simbol-simbol komunikasi misalnya, tampak calon yang kuat tentu akan memenuhi tempat-tempat strategis dalam memasang gambar foto maupun spanduk calon. Padahal gambar foto calon yang dipasang pada tempat-tempat strategis tersebut pengaruhnya besar dalam memperoleh dukungan masyarakat.

### Permasalahan

1. Mengapa digunakan symbol-simbol komunikasi yang berupa baliho, spanduk poster serta stiker?
  - (1) Bagaimana masyarakat memahami symbol-simbol dalam gambar foto calon kepala daerah?
  - (2) Bagaimana perilaku masyarakat dalam memilih calon kepala daerah?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang penggunaan symbol-simbol komunikasi baliho, spanduk poster dan stiker.
  - a. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat akan symbol-simbol yang digunakan dalam iklan politik.
  - b. untuk memahami perilaku memilih dikalangan masyarakat.

### Kerangka Pikir

Bagian dari kehidupan manusia adalah interaksi social. Dalam interaksi tersebut terdapat proses komunikasi.

Dalam pemilukada, proses komunikasi tersebut disebut sebagai komunikasi politik karena tujuannya untuk memperoleh dukungan suara dalam proses pemilihan kepala daerah.

Dalam komunikasi tersebut tentu melibatkan berbagai pihak, antara lain calon beserta teamnya sebagai komunikator, media yang berupa alat atau sarana serta orang-orang yang digunakan sebagai pembantu dan masyarakat pemilihan sebagai komunikan yang menerima pesan dari calon kepala daerah.

Pada saat menyampaikan pesan dan ajakan, banyak digunakan symbol-simbol komunikasi yang berbentuk baliho, spanduk, poster serta stiker yang telah dirancang sedemikian rupa dengan segala macam isi pesan, yang juga tentu sudah dirancang sesuai dengan kondisi social masyarakatnya. Selain menggunakan media gambar baliho yang berisi gambar foto juga sering memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencari dukungan dan bahkan sering menggunakan bantuan berupa aspal, uang maupun sembako. Dengan gambar foto dalam baliho akan dapat menunjukkan pada masyarakat secara luas mengenai calon-calon kepala daerah yang ikut dalam pemilukada beserta partai-partai pendukungnya.

### Metode Penelitian

Oleh karena jenis penelitian ini diskriptif kualitatif maka metode yang digunakan adalah verstehen tau pemahaman interpretative artinya bahwa dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai pemahaman masyarakat akan symbol-simbol komunikasi yang digunakan dalam kampanye politik serta interpretasinya tentang symbol tersebut. Menurut asumsi penulis bahwa pemahaman akan symbol-simbol tersebut serta

interpretasi dari simbol-simbol tersebut akan sangat berpengaruh pada perilaku memilih masyarakat.

### Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

1. sumber data yang berupa barang atau benda seperti gambar foto dan tulisan pada baliho, spanduk posterserta stiker.
2. data sekender dari buku, Koran maupun internet
3. orang yang terlibat dalam proses pemilukada.

### Sampel

Sampel diambil secara acak berdasarkan tujuan dan incidental sifatnya guna upaya menjawab permasalahan yang telah ditentukan, artinya sample yang digunakan sebagai informan maupun responden ditentukan secara kebetulan yang ditemukan di lapangan dan dipilih diantara mereka yang ikut memilih dalam pemilukada

Adapun besarnya 10 orang akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan data yang dibutuhkan, artinya bahwa sekiranya jumlah sample tersebut sudah mencukupi untuk memberikan data yang dibutuhkan maka tidak akan ditambah.

Teknik pengumpulan data digunakan wawancara kepada team sukses, masyarakat pemilih dan tokoh-tokoh masyarakat sebagai mediator serta observasi pada gambar-gambar foto calon kepala daerah yang terpasang diberbagai tempat.

Teknik analisisnya menggunakan teknik induktif yakni analisis melalui proses interaktif antara data satu dengan lainnya, kemudian dikomparasikan dengan data yang didapat dari informan dari tempat yang berbeda.

### Pembahasan

Ada tiga komponen pokok yang perlu dipahami dalam setiap proses analisis penelitian kualitatif, yakni (1) reduksi data,

(2) sajian data, (3) penarikan simpulan dan verifikasi (Milles & Huberman, 1984). Reduksi data dilaksanakan sebelum data disajikan.

Beberapa sajian data penting dalam penelitian ini guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan meliputi beberapa rakitan kalimat yang berhubungan dengan (1) Ujud dan bentuk simbol yang berupa gambar, (2) latar belakang penggunaan simbol berupa gambar kandidat gubernur dan wakilnya, (3) pemahaman dan pemaknaan masyarakat pada simbol-simbol yang terdapat pada gambar kandidat gubernur dan wakilnya, (4) perilaku masyarakat dalam memilih kandidat gubernur dan wakilnya.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dapat dikatakan bahwa dalam komunikasi politik, khususnya kampanye pilkada, selain melalui tayangan media elektronik juga banyak digunakan simbol komunikasi dalam bentuk gambar foto yang disertai dengan simbol tulisan visi, misi maupun program-program yang ditawarkan. Gambar foto kandidat calon gubernur sebagai media masa dapat difungsikan guna menyebar-luaskan isi pesan maupun ajakan untuk mendukung kandidat calon tertentu.

Pada kampanye pemilihan kepala daerah tingkat I propinsi Jawa tengah yang terlaksana pada tanggal 20 Juni 2008 banyak menggunakan media elektronik berbentuk tayangan TV/radio serta media cetak berbentuk gambar foto. Kedua jenis media yang sering digunakan dalam kampanye tersebut tentu memiliki kelebihan masing-masing. Dalam penelitian ini fokus pembahasan terbatas pada penggunaan media cetak yang berujud gambar foto kandidat calon gubernur Jawa Tengah beserta wakilnya. Gambar foto tersebut banyak dipampang pada tempat-tempat umum yang strategis dan dapat terlihat secara jelas oleh khalayak luas.

## 1. Wujud dan Bentuk Simbol Komunikasi Dalam Kampanye Pilkada.

Wujud simbol komunikasi dalam pemilihan kepala daerah berupa gambar foto kandidat calon gubernur dan wakilnya lengkap dengan (a) simbol angka sebagai nomor urut peserta pemilihan (b) simbol tulisan mengenai nama kandidat calon, program kerja beserta visi misi dan pesan-pesan yang disampaikan pada pemirsa (c) simbol warna latar gambar foto kandidat calon.

Gambar-gambar tersebut dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian, yakni berdasarkan :

1. Format maka gambar foto kandidat calon gubernur dan wakilnya dapat dikategorikan berbentuk : a. baleho b.spanduk, c. poster, d. stiker.
2. Isi, terdapat komposisi :
  - (a). gambar foto kandidat calon gubernur dan wakilnya,
  - (b). warna yang melatar-belakangi gambar foto kandidat calon gubernur seperti warna merah untuk gambar foto Bibit Waluyo dan Rustriningsih, kuning untuk kandidat Bambang Adnan warna putih untuk Sukawi Sudharta serta warna hijau untuk Tanzil rozaq.
  - (c). angka adalah sebagai nomor urut peserta pilkada
  - (d). nama kandidat calon gubernur dan wakilnya dan
  - (e) visi, misi atau program kerja sebagai janji politik yang ditawarkan oleh kandidat calon gubernur dan wakilnya.

## 2. Latar belakang Penggunaan Simbol Berupa Gambar Foto Kandidat Calon.

- a. Penggunaan Simbol Gambar Foto  
Data atau informasi ini diperoleh dari sumber yakni beberapa anggota *team* sukses kandidat calon

gubernur yang berbeda. Data menunjukkan adanya kesamaan pemikiran dan pendapat yang menyatakan bahwa simbol gambar foto kandidat calon gubernur dan wakilnya sangat penting untuk proses sosialisasi pada khalayak luas.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa hanya dengan gambar foto seperti tersebut masyarakat atau khalayak luas dapat mengenali wajah kandidat calon gubernur dan tidak harus bertemu secara langsung dengan kandidat calon gubernur.

Mengapa menggunakan media gambar foto kandidat calon yang berbentuk baliho, poster, spanduk serta stiker dan bukan menggunakan media televisi atau media elektronik yang lain?

Menurut penjelasan dari salah satu anggota *team* sukses menyatakan bahwa : dana dan anggaran yang diberikan dari atasan jumlahnya sedikit sehingga harus diupayakan sedemikian rupa supaya tujuan sosialisasi calon gubernur dan wakilnya dapat secara maksimal. Penggunaan media gambar baliho, poster serta spanduk adalah merupakan pilihan yang paling tepat. sedangkan penggunaan media elektronik seperti televisi dan radio dilakukan oleh pusat.

## b. Penggunaan Warna Latar Dalam Gambar Foto

Warna latar dalam gambar foto kandidat calon gubernur mengandung makna sebagai lambang warna khas bendera maupun identitas partai politik pengusung. Keadaan tersebut dapat membantu masyarakat dalam menentukan pilihan calon gubernur dan wakil gubernur ini yang akan dipilih.

Dari informasi tersebut dapat dipahami bahwa warna-warna khas yang menjadi simbol dan identitas partai-partai politik akan mewarnai latar belakang gambar foto dari kandidat calon gubernur dan wakilnya yang diusung oleh partai politik tertentu. Demikian pula apabila kandidat calon gubernur dan wakilnya menggunakan dua kendaraan partai politik atau lebih, maka warna latar dalam gambar foto juga kombinasi dari simbol warna identitas/bendera partai-partai tersebut.

c. **Penggunaan Simbol Yang Berupa Tulisan Dalam Gambar Foto**

Menurut pendapat dari sumber informasi (*team sukses*) menjelaskan bahwa simbol tulisan yang berupa nama kandidat calon gubernur dan wakil serta visi misinya adalah penting bagi pemilih, khususnya yang dapat membaca.

Dengan tulisan yang tertera pada gambar maka pembaca diharapkan akan dapat mengetahui sekilas latar belakang tingkat pendidikan, profesi, jenis kelamin, agama serta program kerja para kandidat calon gubernur dan wakilnya.

d. **Penggunaan Simbol Angka Sebagai Tanda Nomor Urut.**

Semua gambar foto peserta pilkada Jawa Tengah memiliki nomor urut peserta. (Lihat gambar foto pada halaman sebelumnya).

Tanda nomor tersebut akan membantu mengetahui posisi atau letak tanda gambar kandidat calon gubernur yang akan dipilih (dicoblos) antara gambar-gambar foto kandidat calon gubernur lain yang tertera pada lembaran kartu suara.

3. **Pemahaman Dan Pemaknaan Masyarakat Akan Simbol-simbol Yang Tertera Pada Gambar Foto**

Informasi yang diperoleh dari pemilih memberikan penjelasan mengenai pemahaman dan pemaknaan simbol-simbol dalam gambar foto kandidat cagub dan wakilnya sebagai berikut : sebelum melihat gambar foto dalam baliho atau poster, saya belum pernah melihat, seperti apa calon-calon gubernur yang ikut dalam pilkada gubernur Jawa Tengah.

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan tersebut belum pernah mengenal kandidat calon yang akan dipilih. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gambar foto kandidat calon gubernur dan wakilnya memiliki fungsi dan arti penting dalam sosialisasi peserta pilkada gubernur. Paling tidak akan dapat membantu masyarakat luas mengenali wajah kandidat calon gubernurnya.

Dalam hubungannya dengan pemahaman dan pemaknaan simbol-simbol yang tertera pada gambar foto kandidat calon gubernur, mereka pada umumnya dapat memahami isi pesan yang tertera pada gambar baliho. calon dan sebagian masyarakat tidak memahami simbol-simbol tersebut.

4. **Perilaku Memilih**

Memilih dalam arti mencari sesuatu yang cocok dengan selera antara beberapa alternatif yang ada perlu mengenal atau mengetahui terlebih dulu objeknya. Demikian pula dalam memilih kandidat calon gubernur, setiap anggota masyarakat yang akan menentukan pilihannya perlu mengetahui terlebih dulu orang yang menjadi kandidat calon gubernur dan wakilnya Dengan demikian dapat dikatakan tepat, bila proses sosialisasi calon gubernur dan wakilnya menggunakan media masa khu-

susnya berbentuk baliho. Data atau informasi yang terkumpul menjelaskan bahwa masyarakat memiliki ciri antara lain : hubungan emosional, primordial serta hubungan masyarakat dengan tokoh-tokohnya masih sangat kuat sehingga berpengaruh dalam menentukan pilihan kandidat calon gubernur. Kondisi tersebut seringkali dimanfaatkan oleh tokoh partai politik, tokoh agama serta tokoh masyarakat untuk mempengaruhi pola pikir dan mobilisasi suara. (M. Tambuse. 2007)

Banyak antara tokoh-tokoh masyarakat tersebut dibeli oleh kandidat calon gubernur dan digunakan sebagai alat untuk mengkonstruksi pola pikir masyarakat guna memberi dukungan suara pada kandidat calon gubernur sesuai pesanan.

Meskipun responden sebagai calon pemilih dapat memahami dan memaknai visi misi dan program kerja yang ditawarkan, namun pemahaman tersebut tidak berpengaruh atau mengubah keputusan politik untuk memberikan suara pada kandidat calon gubernur yang sesuai partai politiknya.

Dalam memilih dan mencoblos tanda gambar dalam pilkada mereka tidak terpengaruh oleh pemahaman simbol tulisan yang tertera pada gambar baliho serta poster.

Dalam hal perilaku memilih mereka menyatakan bahwa faktor yang paling berpengaruh pada perilaku memilih adalah loyalitas pada keanggotaan atau simpatisan pada partai politik.

Selanjutnya dikemukakan bahwa faktor-faktor lain seperti suku, agama tingkat pendidikan, program kerja yang ditawarkan pada urutan bawah.

Faktor lain menunjukkan bahwa selain petunjuk dari tokoh-tokoh partai, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam menentukan pilihan juga terdapat faktor yang turut serta berpengaruh pada

perilaku politik, seperti faktor ASU (aspal, sembako dan uang), baik untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kolektif seperti dikemukakan sebagai berikut :

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam mencoblos tanda gambar calon gubernur, mereka tinggal memilih sesuai gambar yang telah dibawa dari rumah

## 2. Pembahasan

a. Pembahasan yang berdasarkan pada isi gambar foto.

Pembahasan isi atau analisa isi dalam gambar foto terdapat beberapa bagian atau simbol komunikasi yang penting simbol-simbol komunikasi yang terdapat pada gambar baliho, poster spanduk dan stiker antara lain :

- simbol warna latar dalam gambar foto.
- simbol gambar foto kandidat calon dan wakilnya.
- simbol pakaian yang dikenakan calon
- simbol tulisan mengenai nama dan titel
- simbol angka.

Dari beberapa gambar dapat dilihat bahwa warna latar gambar foto kandidat calon menjelaskan pada masyarakat mengenai partai politik yang mengusung kandidat calon gubernur dan wakilnya.

Namun demikian akan menjadi persoalan apabila partai politik yang mengusung kandidat calon gubernur dari koalisi beberapa partai politik. Tentu pertanyaannya bagaimana simbol komunikasi yang dipakai dalam warna latar gambar foto tersebut. Atau bisa jadi calon gubernur akan memilih warna latar gambar sesukanya sendiri dengan memilih warna yang menyolok atau menarik perhatian banyak orang,

meskipun dalam kenyataannya warna tersebut telah diklaim miliki salah satu dari partai yang ada.

Antara beberapa gambar foto kandidat calon tampak dengan jelas adanya salah satu pasangan kandidat calon gubernur pria dengan wanita. Gambar tersebut tentu akan dapat menarik perhatian masyarakat karena adanya perbedaan dari gambar foto yang lain

Perbedaan tersebut akan memberi nilai tambah tersendiri oleh karena dapat dimaknai berbeda oleh masyarakat luas. seperti misalnya cawagub wanita akan dapat mewakili kaum perempuan. Sedangkan pasangan yang lainnya tidak memiliki variasi seperti tersebut sehingga akan dinilai sebagai yang biasa saja.

Faktor lainnya yang menarik dan membedakan dari gambar foto yang lain adalah mengenai pakaian. Dari beberapa pakaian yang dikenakan para kandidat calon gubernur dan wakilnya ternyata hanya satu yang berbeda, yakni yang dikenakan oleh kandidat calon gubernur pasangan Bibit-Rustri. Dalam gambar, pasangan tersebut calon wakil gubernur mengenakan pakaian jilbab dengan warna kemerahan. Simbol-simbol yang dikenakan tersebut menambah keyakinan pada masyarakat bahwa lebih tepat jika memilih kandidat yang memiliki tanda-tanda seperti tersebut. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan simbol tulisan seperti nama titel pendidikan dan agama.

Meskipun dalam kenyataannya semua kandidat calon gubernur rata-rata berpendidikan tinggi/sarjana akan tetapi pemilih tidak menjadikan faktor penentu dalam memilih calon gubernur, hanya ketetulan saja wilayah Propinsi Jawa Tengah, khususnya kabupaten Klaten memiliki masa basis PDIP yang besar sehingga sebagian besar masyarakat memilih kandidat calon yang diusung oleh partai tersebut.

Pengalaman yang telah dirasakan oleh masyarakat menjelaskan bahwa janji-janji dan program kerja tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan tujuan.

Sedangkan angka dalam gambar berfungsi sebagai tanda nomor dan dapat menjelaskan lokasi urutan tanda gambar yang akan dicoblos pada saat pilkada dilaksanakan.

b. Pembahasan secara holistik

Dalam penelitian ini berupaya membahas mengenai hubungan antara pesan visi misi, program kerja ataupun janji-janji politik yang disampaikan oleh kandidat calon gubernur sebagai komunikator kepada khalayak luas dengan menggunakan simbol-simbol komunikasi berupa warna latar gambar foto kandidat calon gubernur beserta tulisan dengan perilaku memilih dalam pilkada Jawa Tengah.

Setiap kegiatan komunikasi politik terdapat beberapa bagian penting yang perlu menjadi perhatian antara lain adalah komunikator, isi pesan yang disampaikan oleh sumber, simbol yang digunakan menyampaikan pesan, media yang digunakan dan pengaruhnya pada penerima pesan.

Baliho spanduk dan poster yang digunakan sebagai iklan politik dan dianggap sebagai media yang tepat untuk menjelaskan pada khalayak mengenai kelebihan dan keuntungan.

Suatu pertanyaan yang muncul adalah apakah isi pesan yang disampaikan lewat iklan politik oleh kandidat calon gubernur dapat sampai pada sasaran dan bagaimana menyampaikannya?

Untuk membahas permasalahan tersebut terdapat beberapa komponen komunikasi yang perlu diperhatikan, antara lain : (1) siapa yang menyampaikan isi pesan, visi misi, janji politik (2) bentuk simbol komunikasi apa yang di-

gunakan menyampaikannya (3) media apa yang digunakan menyampaikan dan (4) siapa yang menerima isi pesan, visi misi dan janji-janji politik.

Menurut pandangan efek media beranggapan bahwa khalayak adalah objek yang dengan mudah akan dapat dipengaruhi melalui isi pesan dan janji politik sampai akhirnya mengikuti isi pesan dan janji politik tersebut dalam sikap dan perilakunya. Mengikuti alur pemikiran tersebut tentu iklan politik yang penyajiannya lewat media massa tentu akan dianggap sebagai hal yang menentukan dalam meraih dukungan suara. Bukan hanya fungsi sosialisasi saja, media massa juga dapat berfungsi mempengaruhi khalayak luas dan beragam (dalam S.D. Sendjaja, 2008)

Dalam menyampaikan isi pesan, visi misi maupun janji-janji politik tidak setiap orang dapat melakukannya, artinya belum tentu isi pesan yang disampaikan tersebut dapat sampai dan diterima oleh khalayak. Terkadang pesan atau janji-janji politik kurang menarik dan kurang menyentuh pada kepentingan masyarakat, sehingga kurang mendapat perhatian khalayak. Atau bisa jadi komunikator sebagai penyaji pesan tidak memiliki pengaruh kuat pada khalayak. Oleh karena demikian maka pada masa kini banyak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya dimanfaatkan pengaruhnya oleh kandidat calon gubernur untuk mengubah sikap guna mengkonstruksi pola pikir khalayak luas.

Simbol- simbol yang digunakan menyampaikan isi pesan, visi misi dan janji-janji politik perlu mempertimbangkan karakteristik komunikasi sebagai calon pemilih. Hal ini penting untuk diperhatikan sebab bisa saja simbol-simbol yang digunakan dalam menyampaikan pesan tidak dipahami oleh

khalayak, seperti bahasa tulisan atau simbol identitas partai politik.

Dalam hubungannya dengan pemilihan kepala daerah, iklan politik yang berisi visi misi, program kerja tentu diharapkan juga akan dapat mengubah sikap dan perilaku politik khalayak. Namun informan sebagai pemilih di Klaten kenyataannya menunjukkan ketidaksesuaian dengan pandangan tersebut. Mereka menyatakan menerima isi pesan yang disampaikan oleh masing-masing kandidat calon gubernur, namun tidak merubah keputusannya dalam memilih calon gubernur. Mereka menyatakan dapat memahami makna isi pesan yang disampaikan oleh kandidat calon melalui gambar foto dan tulisan yang tertera pada gambar foto tersebut namun tidak akan mempengaruhi pilihannya.

Banyak yang memandang bahwa khalayak sebagai calon pemilih sebagai objek yang dengan mudah dapat digerakkan oleh isi pesan seperti dijelaskan dalam pendekatan efek media. Namun demikian bukan berarti model iklan politik melalui media gambar foto tersebut tidak benar sebab realitas menunjukkan bahwa media gambar foto sedikit-tidaknya dapat membantu. Beberapa informasi yang diperoleh menunjukkan keadaan yang berbeda dengan pandangan efek media. Sebagian dari mereka memang menunjukkan pola pikir dan perilaku sesuai dengan pandangan efek media yakni perilakunya terpengaruh oleh isi pesan yang dibawa oleh media gambar foto kandidat calon gubernur dengan mengikuti pesan dan janji-janji politik yang ditangkap atau dipahami namun sebagian dari kelompok masyarakat calon pemilih di kabupaten Klaten kenyataan berbeda. Sebagian dari mereka memiliki cara berfikir rational dan cerdas serta mendasarkan

pada penilaian visi misi serta program kerja dalam menentukan pilihan. Hanya saja kemampuan memahami isi pesan, janji-janji politik yang datang diterima begitu saja tanpa dibarengi kemampuan selektif memilih atau membandingkan dengan visi misi program kerja dari kandidat lainnya.

Kecenderungan mereka hanya memilih berdasarkan penilaian bahwa yang paling baik adalah isi pesan yang disampaikan lewat iklan politik dari partai pendukung maupun oleh *opinion leaders* nya. Padahal penilaian baik pada visi misi dan program kerja kandidat calon gubernur tersebut adalah subjektif, serta telah sengaja dirancang dan dikonstruksi oleh *team* sukses maupun *opinion leaders*.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pemilih di Klaten dalam memilih gubernur bukannya memilih berdasarkan program, visi, misi namun berdasarkan kesamaan kesamaan tertentu. Artinya bahwa siapapun orangnya, terlepas dari visi misi dan program kerjanya, asalkan diusung oleh partai politiknya, itulah yang akan menjadi pilihannya.

Fenomena lain yang dapat diamati adalah pada saat memilih atau pencoblosan tanda gambar, perilaku pemilih dipandu oleh simbol-simbol dan identitas partai politik pengusung kandidat

calon gubernur, seperti antara lain warna latar gambar foto calon gubernur serta nomor urut peserta pilkada.

Pemilih usia lanjut bahkan membawa stiker gambar foto kandidat calon gubernur yang akan dicoblos sebagai panduan untuk menghindari salah coblos tanda gambar. Fakta lain menunjukkan bahwa ada faktor lain yang digunakan membujuk masyarakat untuk memilih, yakni bantuan berupa Aspal, Sembako maupun Uang (ASU).

Mengamati kondisi pemilih di Klaten tersebut tentu akan menimbulkan keprihatinan banyak pihak, sebab posisi gubernur dan wakil gubernur adalah posisi kepala daerah propinsi tingkat I yang memiliki fungsi eksekutif dalam melaksanakan amanah rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan. Sehingga apabila pemilih memilih kandidat calon gubernur bukan berdasarkan kemampuan bekerja yang dituangkan dalam visi misi dan program kerjanya maka tentu saja tidak akan dapat memenuhi harapan masyarakat.

Rasionalitas yang berkembang pada masyarakat seperti tersebut bukan merupakan suatu penyimpangan dalam pola pikir akan tetapi justru merupakan keseimbangan sosial seperti dijelaskan dalam teori pertukaran sosial

## Daftar Pustaka

- Alwasilah C.A 2003, *Pokoknya kualitatif, Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Jakarta Kiblat Buku Utama.
- Dan Nimo,1990. *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan Dan Media* . Bandung PT Remaja Rosdakarya.
- Prihatmoko,Joko 2005, *Penelitian Kepala Daerah Langsung, Profil, Sistem Dan Problem Penerapan Di Indonesia*, Yogyakarta, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Wahid Hasyim dan Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi*, Semarang, Lp2I

Sutopo,H.B, 2002 *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar, Teori Dan Terapanny Dalam Penelitian*. Surakarta UNS Press.

Dehlia Nor, 2002,*Komunikasi politik Dalam Kepentingan Nasional* , Jakarta, Pusat Kajian Strategis Untuk Kepentingan Nasional.

Kompas, Senin 18 Februari 2008

WWW. Google.Com Jurnal Pilkada

WWW. Google.Com. Hasil Pilgub Jawa Tengah

# CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI PILAR BUDAYA KORPORASI UNTUK MEMPERKUAT GOOD CORPORATE GOVERNANCE.

Lestariningsih  
Ilmu Administrasi  
FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta

## **Abstract**

*Good Corporate Governance (GCG) running, if the individuals internally has a value system that encourages them to accept, support and implement good corporate governance (GCG). Value systems that exist in individuals grow within the company and used as the adhesive system called corporate culture, while one of the pillars of corporate culture is corporate sosial responsibility. The company that upholds sosial responsibility will obtain a positive institutional image, because the company was not only superior companies who can score big profits, but also companies that proved capable of implementing Corporate Social Responsibility (CSR) with high quality. This practice is actually driven by corporate values that say that CSR is not a job, but part and the life and strength of the company.*

**Key words :** *Corporate Social Responsibility, Corporate Culture, Good Corporate Governcance*

## **A. Pendahuluan**

*Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan untuk menentukan arah kinerja perusahaan. Isu mengenai *corporate governance* mulai santer dibicarakan di Indonesia pada tahun 1998, ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan yang memberikan dampak pada lemahnya berbagai sector. Banyak pihak yang mengatakan bahwa lamanya proses pemulihan dan perbaikan sosial ekonomi di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan perusahaan-perusahaan di Indonesia dan sejak saat itulah baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance*

dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang sehat dan baik atau *good corporate governance* (GCG).

Penerapan *good corporate governance* merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia, sedangkan peran dan tuntutan investor serta kreditor asing untuk menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan atau dengan kata lain, baik investor maupun kreditor asing mau menanam modalnya hanya pada perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* karena dapat menjaga kesinambungan usaha jangka panjang. Sedangkan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada dasarnya

memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. *Corporate governance* itu sendiri lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar analisis dalam mengkaji *corporate governance* di suatu negara dengan memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dengan sistematis serta dapat digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja perusahaan dan adanya korelasi antar kebijakan tentang karyawan/buruh dan kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh The Indonesian *Institute for Corporate Governance* (IICG, 2002) menemukan bahwa alasan utama perusahaan menerapkan *good corporate governance* adalah kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu prinsip *good corporate governance* adalah masalah pertanggung jawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta penerapan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab perusahaan sebagai bagian lembaga dalam kehidupan masyarakat yang tunduk pada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan komunitas yang ada di sekitar perusahaan. Prinsip ini diwujudkan atas dasar kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap komunitas dan lingkungan, sehingga terpeliharanya kesi-

nambungan usaha jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Sementara realita menunjukkan adanya tiga kepentingan *public* yang oleh perusahaan-perusahaan cenderung terabaikan yaitu pertama, perusahaan hanya bertanggung jawab secara hukum terhadap para pemegang saham (*shareholders*), sedangkan komunitas tempat di mana perusahaan tersebut berdomisili kurang diperhatikan. Kedua, dampak *negative* yang ditimbulkan oleh perusahaan semakin meningkat dan harus ditanggung oleh komunitas sekitarnya, sementara itu sebagian besar keuntungan manfaat hanya dinikmati oleh pemilik saham perusahaan saja. Ketiga, komunitas sekitar perusahaan yang menjadi korban sebagian besar mengalami kesulitan untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan, hal ini disebabkan belum ada hukum yang mengatur secara jelas tentang akuntabilitas dan kewajiban perusahaan kepada *public*.

Pada akhir-akhir ini terdapat kecenderungan (*trend*) meningkatnya tuntutan *public* terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan sebagai perwujudan implementasi *good corporate governance* yaitu dengan menerapkan prinsip *corporate sosial responsibility* (CSR).

*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab perusahaan menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari seiring dengan bermunculannya tuntutan komunitas terhadap korporat. Korporat sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan juga oleh komunitas yang berada disekelilingnya. Ini artinya telah terjadi pergeseran hubungan antara korporat dan komunitas yaitu korporat yang semula memposisikan diri sebagai pemberi donasi melalui kegiatan *charity* dan *phylanthrophy*, kini memposisikan komunitas sebagai mitra yang turut andil dalam kelangsungan eksistensi korporat. Sedangkan komunitas menurut Wilbur J. Peak bukan sekedar

sekumpulan orang yang tinggal dilokasi yang sama tetapi juga menunjukkan terjadinya interaksi diantaranya, jadi selain faktor kesamaan lokasi tempat tinggal, komunitas juga merupakan unit sosial yang terbentuk lantaran adanya interaksi diantara mereka (Iriantara, 2004:22)

Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh korporat untuk menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan komunitas yaitu melalui program *community relations* (CR). CR menurut Jerold sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya untuk kemashlahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. (Reza Rahman 2009:7). Selain CR juga dikenal adanya program *community development* (CD) yaitu kegiatan pengembangan masyarakat yang diselenggarakan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik. (Arif Budimanta dkk, 2008 :46). Secara hakekat CD merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh industri, pemerintah pusat dan daerah terhadap kehidupan komunitas lokal yang artinya bahwa industri adalah sebuah elemen dari serangkaian elemen yang ada dalam masyarakat. Sebagai salah satu elemen, industri masuk dalam struktur sosial masyarakat setempat dan berpengaruh terhadap elemen yang ada. Dengan kesadarannya industri harus dapat membawa komunitas lokal ke arah kemandirian tanpa merusak tatanan sosial budaya yang sudah ada. (Reza Rahman, 2009:9).

Ada tiga alasan penting korporat melakukan program *community development* yaitu:

### B. Ijin lokal

Ijin lokal merupakan hal mutlak yang diperlukan oleh perusahaan, artinya sama pentingnya dengan ijin secara legal formal dari pemerintah. Ijin lokal dalam konteks ini adalah adanya usaha untuk melibatkan

komunitas lokal dalam cakupan usaha dan perusahaan sebagai bagian dari komunitas bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menghasilkan keuntungan secara bersama-sama.

1. Mengatur dan menciptakan strategi ke depan.

Kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan komunitas lokal, memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk meningkatkan reputasi yang berimplikasi pada adanya peluang usaha baru. Ini karena secara fungsional, komunitas lokal dapat mendukung usaha perusahaan melalui aktivitas yang terencana yang terdapat dalam program CD. Usaha-usaha komunitas lokal selain dapat meningkatkan pendapatan mereka, juga memudahkan perusahaan untuk mendapatkan apa yang diinginkan sebagai suatu ikatan kerja atau usaha.

2. Sebagai cara untuk mencapai tujuan bersama.

Sejumlah program CD yang diselenggarakan, diintegrasikan dengan model kebudayaan nasional. Pembangunan sebagai suatu program nasional diinterpretasikan komunitas lokal sebagai usaha tujuan bersama.

Ruang lingkup program *community development* adalah :

1. *Community services*, merupakan pelayanan korporat untuk memenuhi kepentingan masyarakat ataupun kepentingan umum.
2. *Community empowering*, adalah program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya.
3. *Community relation* yaitu kegiatan yang terkait dengan pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. (Arif Budimanta dkk, 2008: 98-99).

### ***Community Development Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Yang Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance***

Pengusahaan sebuah usaha yang berkaitan dengan sumberdaya, hendaklah mengingat dan memperhatikan keadaan gejala sosial budaya yang ada di sekitarnya, terutama situasi dan kondisi globalisasi saat ini, mendorong dinamika dan pergerakan sosial budaya masyarakat yang cepat dan bervariasi antar waktu dan ruang. Hal ini baik langsung maupun tidak langsung akan dapat mempengaruhi bahkan menghambat berjalannya perusahaan itu sendiri, seperti munculnya kesenjangan sosial akibat dari pola hidup dan pendapatan yang sangat jauh berbeda antara korporat (pegawai perusahaan) dengan masyarakat sekitar.

Memang keberadaan suatu perusahaan di suatu daerah, akan mendorong bermunculannya kegiatan-kegiatan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Adanya perusahaan-perusahaan jasa penunjang kehidupan perusahaan yang besar memberikan manfaat yang positif bagi komunitas lokal, tetapi kadang-kadang juga, kemunculan perusahaan jasa ini pada umumnya berasal dari luar masyarakat dengan model usaha yang berbeda dengan komunitas lokal.

Kesenjangan pola hidup antara komunitas-komuniti (korporat, pendatang dan lokal) semakin jauh manakala masing-masing komunitas menerapkan model eksklusifme masing-masing yang artinya terjadi suatu pengkotak-kotakan antara masing-masing komunitas, sedangkan komunitas korporat membuat jarak pola hidupnya dengan membatasi diri dengan membuat pagar-pagar di seluruh lingkungan perumahan, komunitas pendatang juga membuat beberapa kantung perumahan-perumahan mewah atau kompleks permukiman tertentu dengan model pasar, rumah sakit serta sekolahan yang tersendiri pula yang kemudian membuat komunitas lokal semakin termajinalisasi.

Keadaan yang semacam ini semakin membuat suatu kecemburuan sosial yang semakin besar, perbedaan pengetahuan, pola hidup dan juga kepemilikan kebendaan secara phisik dapat memicu konflik dan masalah-masalah sosial lainnya, munculnya kriminalitas dan gejala patologi lainnya dapat memunculkan anggapan-anggapan negative terhadap komunitas lokal, seperti perampokan, pencurian dan sebagainya, sedangkan komunitas lokal seperti sudah menjadi suatu tradisi mendapatkan label sebagai biang keonaran dari sebagian anggota komunitas yang ada.

Tanggung jawab sosial korporasi didefinisikan sebagai internalisasi oleh perusahaan dalam aspek sosial, memasukkan hak azasi manusia dan dampak lingkungan dari beroperasinya korporasi atau usaha untuk proaktif dalam pencegahan polusi dan penilaian resiko dampak sosial politik sehingga kecurangan dan kerugian terhadap hak azasi manusia dapat diantisipasi dan dihindari dari awal dan keuntungan dioptimalkan pada proses yang sedang berjalan (Warhurst dalam Arif Budimanta dkk, 2008:112). Konsep ini tentang strategi jangka panjang perusahaan dan kapasitas target yang sudah dibuat untuk kelanjutan berkompetisi dalam berkontribusi yang mengarah pada tujuan pembangunan berkelanjutan secara tradisional bertanggung jawab dalam lingkup pemegang saham, karyawan dan aturan (hukum).

Korporat tidak lagi hanya mewujudkan citranya melalui kampanye atau *public relation* tetapi harus mampu menunjukkan akuntabilitasnya kepada kepentingan *public*. Korporasi yang akuntabel akan memperhatikan *corporate sosial responsibility* semaksimal mungkin yang didukung oleh aparat perusahaan yang bersih (*good corporate governance*). *Corporate sosial responsibility* dan *good corporate governance* merupakan dua sisi dari satu mata uang, dimana tanpa adanya *good corporate governance*,

tidak mungkin suatu *corporate sosial responsibility* dapat dilaksanakan. Apalagi kondisi saat ini, dimana kita berada dalam suasana alam demokrasi, bukan hanya masalah politik yang harus melibatkan seluruh masyarakat, akan tetapi juga korporasi berkewajiban melibatkan kepentingan masyarakat termasuk stakeholders dalam upaya memperlakukan kegiatannya.

*Good corporate governance* mengisyaratkan adanya suatu organisasi yang pelaku-pelakunya di dalam organisasi tersebut bersih dari segala manipulasi dan sikap yang memetingkan diri sendiri. *Good corporate governance* berarti juga suatu birokrasi yang bersih dari segala manipulasi dan pelaku-pelakunya lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Suatu bentuk birokrasi dengan segala aturan dan nilai serta norma yang ada di organisasi tersebut dipakai oleh pelaku-pelaku dalam organisasi yang bersangkutan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungannya dan hasil pemahaman tersebut dipakai juga oleh pelaku-pelakunya dalam mewujudkan tingkah laku, sehingga antara nilai, norma dan aturan dalam organisasi sesuai dengan tingkah laku obyektif yang terwujud dalam kenyataan.

Dalam lingkungan korporasi yang ada terdapat beberapa kelompok kepentingan yang berkaitan langsung dengan korporat yang dapat mempengaruhi berjalannya aktivitas korporasi (termasuk *stakeholders*), sedangkan keberadaan *stakeholders* sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan *corporate sosial responsibility*. Hubungan korporasi dengan *stakeholders* tidak lagi bersifat pengelolaan saja melainkan sekaligus melakukan kolaborasi yang dilakukan secara terpadu dan berfokus pada pembangunan kemitraan. Kemitraan ini tidak lagi bersifat penyangga organisasi, tetapi menciptakan kesempatan-kesempatan dan keuntungan bersama, diperlukan untuk tujuan jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan, misi, nilai-nilai dan

strategi-strategi tanggung jawab perusahaan secara sosial yang pada dasarnya mendorong korporasi untuk dapat hidup berkelanjutan atau berkesinambungan di dalam masyarakat, sedangkan kemitraan ini juga menciptakan pembagian keuntungan bersama dan tidak menciptakan persaingan negatif yang berpengaruh pada kelanjutan perusahaan tersebut.

Kemitraan yang terwujud dalam interaksi antar stakeholders ini pada dasarnya merupakan juga suatu bentuk pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai muara dari *corporate sosial responsibility*. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah meningkatkan kemampuan atau kualitas anggota-anggotanya yang tergabung dalam komuniti-komuniti untuk dapat bermitra dan berfungsi satu dengan lainnya sebagai keseluruhan anggota masyarakat, sedangkan rangkaian dari aktivitas pemberdayaan masyarakat tersebut saling berkesinambungan dan berfungsi satu sama lain.

Ada banyak model kelembagaan pengelolaan program *community development* di beberapa perusahaan ada yang sudah membentuk satuan kerja sendiri, tetapi ada juga yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga (walaupun masih berada di bawah pengawasan perusahaan), namun ada juga pengelolaannya menjadi satu dengan unit kerja yang lain seperti dengan satuan kerja humas, lingkungan. Pada umumnya kelembagaan yang terkait dengan unit kerja perusahaan untuk memudahkan:

1. Pengawasan pada tingkat bahaya yang terjadi dalam komunikasi antara lembaga donor tertentu dan perusahaan.
2. Membuat hubungan kerjasama *community development* dengan unit-unit kerja.

Secara hakekat *community development* merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh korporat, pemerintah pusat dan daerah terhadap kehi-

dupan komuniti-komuniti lokal, artinya bahwa korporat adalah sebuah elemen dari serangkaian elemen hidup yang berlaku di masyarakat, berarti korporat masuk dalam struktur sosial masyarakat setempat dan berfungsi terhadap elemen lainnya yang ada. Dan dengan kesadarannya korporat harus dapat membawa komuniti-komuniti lokal bergerak menuju kemandiriannya tanpa merusak tatanan sosial budaya yang sudah ada (Rudito, 2003:4). Dengan kata lain masyarakat terdiri dari komuniti-komuniti termasuk komuniti korporat yang semua komuniti tersebut saling mempengaruhi, berinteraksi dan beradaptasi sebagai anggota masyarakat, ini berarti adanya kesetaraan, saling menghargai dalam sosial budaya yang beragam atau multicultural. Kesetaraan sebagai suatu kesatuan komuniti, saling menghargai dan mengakui adanya perbedaan yang berarti, dan tidak adanya usaha saling mendominasi antar masing-masing stakeholder yang didalamnya terkandung pengutamaan hak azasi manusia.

Beroperasinya perusahaan haruslah mengingat dan memperhatikan keadaan gejala sosial budaya yang ada disekitarnya, sehingga dengan adanya pergerakan sosial budaya komuniti-komuniti sekitar yang nyata-nyata bervariasi akan dapat menghambat berjalannya perusahaan itu sendiri, seperti munculnya kecemburuan sosial akibat dari pola hidup dan pendapatan yang sangat jauh berbeda antara korporat dengan komuniti-komuniti sekitar. Di sini tampak bahwa korporat merupakan komuniti yang berusaha di daerah komuniti lokal sebagai pemegang hak ulayat, serta komuniti lainnya yang hidup atau mencari kehidupan di daerah tersebut.

Interaksi komuniti-komuniti dalam masyarakat dengan komuniti korporat adalah masalah kompleks dan kaya dengan variasi, sehingga korporat perlu mempunyai *community development guidelines* yang jelas tetapi luwes serta dapat

memahami struktur sosial dan kebudayaan komuniti lokal. Dalam beberapa bentuk korporat multinasional yang besar, kadangkala fleksibilitas yang diperlukan dalam pengembangan *community development* tidak ditemui, demikian juga di kalangan BUMN yang masih dikenal dengan polanya yang sentralistik dan konservatif. Hal ini lebih disebabkan kekurangan pengetahuan secara etnik terhadap kondisi komuniti sakitarnya, maka suksesnya *program comuniti development*, disamping banyak tergantung dari politik makro, juga dalam tingkat mikro tergantung dari budaya dan komitmen korporat (Kusumaatmaja dalam Arif Budimanta dkk, 2008:120). Sebenarnya program *community development* merupakan pekerjaan di mana antara rasio dan perasaan harus berperan secara seimbang, karena yang menjadi target adalah tercapainya dukungan dan peran masyarakat melalui penanaman kepercayaan dan pembangkitan harapan.

### **Corporate Social Responsibility Sebagai Pilar Budaya Korporasi Untuk Memperkuat Good Corporate Governance**

Hofstede (1994:73) menyatakan bahwa budaya merupakan *software of mind* yang menjadi mental *programming* organisasi dalam mengarahkan pola-pola berpikir, merasakan dan tindakan organisasional. Berangkat dari pengertian budaya tersebut dapat dipahami bahwa budaya korporasi adalah system makna untuk membina mental agar pemikiran dan tindakan karyawan didasarkan pada pertimbangan moral dan dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya budaya korporasi juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat asumsi yang dibangun dan dianut bersama oleh organisasi sebagai moral dalam beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan proses integrasi internal. (Poerwanto,2008:16).

Pada dasarnya budaya muncul dari tiga sumber: Seperangkat asumsi yang

dimaksud adalah filosofi, nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, ide, mitos dan karya yang terintegrasi untuk mengarahkan perilaku organisasi, selain itu seperangkat asumsi tersebut merupakan isi budaya korporasi yang berkaitan dengan apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh semua karyawan. Isi budaya adalah moral yaitu watak organisasi yang mengutamakan nilai-nilai kebaikan yang harus diterima dan disepakati untuk menjadi roh kehidupan organisasi atau korporasi. Sebagai moral, bentuk dari budaya dapat berupa pemikiran, tindakan dan hasil kerja yang didasari dengan nilai-nilai baik untuk menjadi ciri atau citra korporasi/perusahaan.

Produk dan merek adalah karya perusahaan yang menjadi identitas, untuk mewujudkan karya yang memiliki identitas dan berkesinambungan diperlukan filosofi, ide-ide, keyakinan dan norma agar karyanya bermanfaat, tidak merugikan tetapi menguntungkan bagi stakeholders dan komuniti-komuniti sekitarnya. Schein (1997:51) menjelaskan menjelaskan bahwa

1. Keyakinan-keyakinan, nilai-nilai dan asumsi dari para pendiri korporasi
2. Belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh anggota kelompok sebagaimana perkembangan korporasi.
3. Keyakinan-keyakinan, nilai-nilai dan asumsi-asumsi baru yang dibawa masuk oleh pimpinan dan anggota baru.

Perusahaan tidak terbentuk dengan sendirinya melainkan merupakan suatu proses dari pendiri yang mempunyai gagasan, visi, ide-ide dan tujuan, pendiri dalam hal ini dapat perorangan atau kelompok dan berunding mengenai pengelolaan perusahaan, namun pada perusahaan-perusahaan terkemuka yang sudah mendunia pola pengelolaan perusahaan diawali dari filosofi pendiri. Filosofi kemudian menjadi dasar visi dan misi perusahaan serta sejumlah asumsi yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti slogan atau logo perusahaan, sedang-

kan budaya mempunyai kaitan dan peran terhadap berbagai aspek kehidupan perusahaan secara menyeluruh.

Secara spesifik budaya memiliki lima peran yaitu:

1. Budaya memberikan rasa memiliki identitas dan kebanggaan bagi karyawan, yakni menciptakan perbedaan yang jelas antara organisasinya dengan yang lain.
2. Budaya mempermudah terbentuknya komitmen dan pemikiran yang lebih luas dari pada kepentingan pribadi seseorang.
3. Memperkuat standar perilaku organisasi dalam membangun pelayanan superior pada pelanggan.
4. Budaya menciptakan pola adaptasi.
5. Membangun *system control* organisasi secara menyeluruh.

Fungsi-fungsi budaya korporasi merupakan kekuatan yang menggerakkan dan mengendalikan perilaku anggotanya dalam berkomunikasi dengan lingkungannya. Budaya yang kuat berperan dalam dua hal, pertama, mengarahkan perilaku, karyawan mengerti bagaimana harus bertindak dan apa yang diharapkan dari mereka. Kedua, budaya yang kuat memberi karyawan pengertian akan tujuan dan membuat mereka berpikiran positif terhadap perusahaan. Mereka mengerti apa yang ingin dicapai perusahaan dan bagaimana cara membantu perusahaan mencapai sasaran tersebut. Budaya berfungsi sebagai perekat yang menyatukan semua anggota organisasi perusahaan, jika perusahaan memiliki budaya yang kuat, maka organisasi dan karyawannya akan memiliki perilaku yang seiring dan sejalan. Dapat dikatakan bahwa budaya korporasi (*corporate culture*) juga merupakan system nilai yang ada pada individu, tumbuh di dalam perusahaan dan digunakan sebagai system perekat dalam aktivitas *good corporate governance*. Sedangkan *good corporate governance* berjalan jika individu-

individu secara internal mempunyai value atau system nilai yang mendorong mereka untuk menerima, mendukung dan melaksanakan *good corporate governance* dengan perekat *good corporate culture*. (Djokosantoso Moeljono, 2005:8)

Jadi *good corporate culture* (GCC) merupakan inti atau akar dari *good corporate governance* (GCG), di mana *good corporate governance* berperan untuk memastikan atau menjamin bahwa manajemen perusahaan dilaksanakan dengan baik. Manajemen yang baik dapat mengembangkan organisasi perusahaan, untuk mencapai keberhasilan organisasi perusahaan tersebut diperlukan rumusan dan tujuan, termasuk visi dan misi perusahaan. Tujuan perusahaan sebenarnya digerakkan oleh value dari korporasi, baik dalam bentuk muatan maupun cara. Pemikiran demikian dapat dijadikan sebagai pemandu dasar untuk memahami di mana letak *good corporate culture* dan bagaimana *good corporate culture* harus menjadi imperative baru bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menjadikan *good corporate governance*-nya berjalan baik dan sehat, dengan manajemen berkinerja optimal, perusahaan mampu memberikan nilai kepada masyarakat dan akhirnya menjadikannya perusahaan yang memiliki nilai korporasi tinggi, khususnya diperlihatkan pada kinerja bisnisnya. Pemetaan tersebut dipergunakan untuk mempermudah memahami lokus *good corporate culture* terhadap *good corporate governance*.

Dengan demikian *good corporate culture* menjadi inti dari empat konteks yaitu *Good Corporate Governance*, *Manajemen*, *Corporate Social Responsibilities* dan *Etika Bisnis*. Dikemukakan demikian karena perusahaan yang unggul dan terpuji biasanya memiliki ciri empat keunggulan sebagai berikut:

1. Manajemennya unggul sehingga perusahaan dapat mengkreasikan kinerja yang tinggi dan laba usaha yang optimal.

2. Proses manajemen yang unggul dijaga oleh praktek *good corporate governance* yang terdiri atas lima *cunducts* pokok yakni *transparansi*, *independensi*, *akuntabilitas*, *responsibilitas* dan *fairness*. *Good corporate governance* merupakan prasyarat kualitas pengelolaan korporasi yang disyaratkan dalam persaingan global. Korporasi yang melaksanakan *good corporate governance* memperoleh akseptansi yang lebih tinggi.
3. Korporasi yang menjunjung tinggi tanggung jawab sosial perusahaan akan memperoleh citra kelembagaan yang positif. Arie de Geus dan David Bollier menunjukkan bahwa korporasi-korporasi yang unggul ternyata bukan saja korporasi yang mampu mencetak laba yang tinggi, namun juga korporasi yang terbukti mempunyai kualitas *corporate social responsibility* yang tinggi. Praktek ini sebenarnya digerakkan oleh *corporate value* yang mengatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bukanlah tugas, melainkan bagian dari kehidupan korporasi.
4. Korporasi yang berbisnis dengan melandaskan diri pada etika adalah korporasi yang mempunyai akseptansi yang tinggi, baik dalam lingkungan bisnis, sosial maupun politik. (Djokosantoso Moeljono, 2005: 20-21).

Dari penjabaran tersebut menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* merupakan salah satu pilar dan keunggulan *good corporate culture* yang menjadi inti atau akar untuk memperkuat kehidupan *good corporate governance* secara berkesinambungan. *Corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan perusahaan dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang didasarkan pada etika dan budaya, oleh sebab itu tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan dengan etika dan bu-

daya. Secara umum etika dipahami sebagai aturan tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang mengarahkan pada perilaku seseorang atau kelompok mengenai baik atau buruk. Jones (1991) menyatakan etika berkaitan dengan nilai-nilai internal yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (*corporate culture*) dan membentuk keputusan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Banyak perusahaan yang mengutamakan tanggung jawab sosial sebagai kepedulian terhadap masyarakat sekitar, tetapi sebenarnya tanggung jawab sosial perusahaan lebih luas dan lebih dinamis.

Sejak ide Carnegie tentang tanggung jawab sosial hingga sekarang muncul berbagai definisi atau pemikiran yang terus berkembang selaras dengan kondisi lingkungan. Hughes dan Kapoor (1985) mendefinisikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu pengakuan kegiatan-kegiatan bisnis mempunyai dampak pada masyarakat, sedangkan dampak tersebut menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Baron (2003) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen moral terhadap prinsip-prinsip khusus atau mendistribusikan kembali sebagian dari kekayaan perusahaan kepada pihak lain. Philip Kotler & Nancy Lee (2005) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen untuk memperbaiki kesejahteraan komunitas melalui praktek-praktek kebijakan bisnis dan dengan keterlibatan-keterlibatan dari sumber-sumber perusahaan. Menurut mereka elemen kunci dalam definisi tersebut adalah kebijakan, sedangkan istilah kesejahteraan komunitas termasuk di dalamnya kondisi kehidupan manusia dan isu-isu lingkungan. Sedangkan Ferrel, Hirt & Linda Ferrel (2006) memberikan pengertian bahwa tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban para pelaku bisnis untuk memaksimalkan dampak positif dan memi-

nimalkan dampak *negative* pada masyarakat. (Poerwanto, 2008:173). Dari beberapa pendapat tentang pengertian tersebut dapat digambarkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah salah satu bentuk dari isi atau inti budaya perusahaan yang merupakan bagian integral dari interaksi antara perusahaan dengan lingkungannya.

Terdapat tiga pendekatan dalam pembentukan tanggung jawab sosial perusahaan adalah :

1. Pendekatan moral yaitu kebijakan atau tindakan yang didasarkan pada prinsip kesantunan dengan pengertian bahwa apa yang dilakukan tidak melanggar atau merugikan pihak-pihak lain.
2. Pendekatan kepentingan bersama, menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan moral harus didasarkan pada standar kebersamaan, kewajaran dan kebebasan.
3. Pendekatan manfaat adalah konsep tanggung jawab sosial yang didasarkan pada nilai-nilai bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan menghasilkan manfaat besar bagi pihak-pihak berkepentingan secara adil. (Poerwanto, 2008:187).

Tanggung jawab sosial perusahaan telah mengalami berbagai perubahan bentuk kegiatan yang disebabkan oleh kepentingan-kepentingan dan kebutuhan keseimbangan hidup. Perusahaan-perusahaan modern telah menjadikan tanggung jawab sosial sebagai investasi dan selalu mencoba membangun komunitas yang terbuka serta sehat untuk menghindari konflik yang dapat merugikan pihak-pihak berkepentingan.

### C. Kesimpulan.

*Good corporate governance* dalam masyarakat berperan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menyediakan barang atau jasa yang diperlukan serta mendapatkan keuntungan. Dalam upaya memperoleh keuntungan, *good corporate governance* harus dijalankan berdasarkan pada

kepedulian dan tanggung jawab sosial (CSR), karena keduanya dasar bagi manajemen untuk membuat manajemen strategis. Dalam kaitannya tersebut budaya perusahaan (*corporate culture*) secara internal berfungsi untuk menciptakan kondisi di mana karyawan harus menjaga perilaku individual dan perusahaan. Para manajer harus mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan bahwa perilaku perusahaan berada pada jalur yang sesuai dengan filosofi, etika dan budaya perusahaan. Para pemimpin perusahaan perlu membangun dan menanamkan etika dan budaya perusahaan dengan membuat kode etik perilaku yang diawali pada tindakannya sendiri untuk membantu karyawan dalam mewujudkan dan mencerminkan nilai-nilai yang telah dibangun perusahaan. Kode etik perusahaan merupakan pernyataan resmi yang memuat nilai-nilai perusahaan berkenaan dengan etika, budaya dan isu sosial yang dibangun serta dikomunikasikan kepada seluruh karyawan.

Dalam kode etik terdapat dua jenis pernyataan yaitu:

1. Pernyataan berdasarkan prinsip yang dirancang untuk mempengaruhi budaya perusahaan dan mengandung pengertian sebagai nilai-nilai fundamental serta memuat bahasa yang umum mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, kualitas produk dan perlakuan terhadap karyawan. Pernyataan-pernyataan umum dari prinsip ini sering

disebut *corporate credos* atau paham perusahaan yang merupakan dasar dari budaya perusahaan.

2. Pernyataan yang berdasarkan kebijakan umumnya member garis besar prosedur yang akan digunakan dalam situasi etika tertentu, situasi-situasi ini dapat mencakup praktek pemasaran, konflik kepentingan, pengamatan undang-undang, informasi hak milik, garansi dan jaminan. Misalnya kredo atau slogan yang dimanifestasikan dalam pernyataan sebagai deskripsi dari tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu pendukung terbentuknya citra perusahaan.

Tanggung jawab sosial (CSR) sebagai salah satu pilar dari budaya perusahaan dapat membangun dan mempertahankan citra perusahaan. Citra perusahaan adalah kesan menyeluruh terhadap organisasi yang mencakup kualitas produk, layanan, tampilan dan perilaku organisasional maupun individual karyawan. Tampilan artifak, nilai-nilai serta asumsi dasar seperti nama perusahaan dan kualitas produk termasuk bagian untuk membangun citra perusahaan. Citra perusahaan sebagai ujung tombak performansi perusahaan secara menyeluruh, dengan citra perusahaan yang baik di kalangan masyarakat atau stakeholders akan dapat memperkuat *good corporate governance* dalam kehidupannya secara berkesinambungan.

## Daftar Pustaka

- Arif Budimanta, Adi Prasetijo, Bambang Rudito, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta, ICSD.
- Baron David P, 2003, *Business and Its Environment*, New Jersey, Prentice- Hall.
- Bambang Rudito dkk, 2003, *Akses Peran Serta Masyarakat: Lebih memahami community development*, Jakarta, ICSD dan Pustaka Sinar Harapan.
- Djokosantoso Moeljono, 2005, *Good Corporate Culture Sebagai Inti Dari Good Corporate Governance*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.

- \_\_\_\_\_, 2005, Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Hofstede, Geert, 1980, Cultures Consequences, International Differences in Work-Related Values, Volume 5, Cross-Cultural Research and Methodology Series, California, Sage Publications.
- Hughes Robert J and Kapoor Jack R, 1985, Business, Boston, Houghton Mifflin Company.
- Isa Wahyudi, Busyra Azheri, 2008, Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan implementasi, Malang, In-Trans Publishing.
- Poerwanto, 2008, Budaya Perusahaan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Reza Rahman, 2009, Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan, Yogyakarta, Media Pressindo.
- Siswanto Sutojo, E John Aldridge, Good Corporate Governance-Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat, Jakarta, PT Damar Mulia Pustaka.

**Sumber lain :**

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Jurnal Filantropi Dan Masyarakat Madani; GALANG, Vol.1 No.2, Januari 2006.



# FENOMENA NIKAH SIRI DI KALANGAN MAHASISWA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN

Sri Hilmi Pujihartati  
Sosiologi  
FISIP Universitas Sebelas Maret

## Abstract

*Siri marriage phenomenon among college students are often occurs while students are thinkers needed by the public because these are at the already educated. Meanwhile siri marriage is a marriage that is not accounted for by the State and therefore a marriage that has been done is not recognized by the State.*

*The results showed that those who do siri marriage driven by religion in addition they will still do siri marriage because of economic reasons that encouraged the family burden may be reduced because it has become part of the husband's family.*

*While the impact for women who do siri marriage became uncomfortable when they have to deal with people like when they're always alone while they were dealing with the rights and obligations of each one because it really was not ready to bear the brunt of the rights and obligations as a husband.*

**Key words :** *marriage, family, student.*

## A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah lembaga dasar dari mana semua lembaga lainnya berkembang karena kebudayaan yang makin kompleks menjadikan lembaga-lembaga itu penting. Sebagai lembaga sosial, tentunya keluarga akan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Untuk membentuk keluarga dibutuhkan suatu proses yang disebut perkawinan, dimana perkawinan adalah suatu pola sosial yang disetujui, dengan cara dua orang atau lebih membentuk keluarga. (Horton and Hunt 1996 : 270)

Perkawinan tidak hanya mencakup hak untuk melahirkan dan membesarkan anak, tetapi juga seperangkat kewajiban dan hak istimewa yang mempengaruhi banyak orang (masyarakat). Arti sesungguhnya dari perkawinan adalah penerimaan status baru, dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru serta pengakuan akan status baru oleh orang lain.

Oleh karena itu perkawinan sangat diperhatikan oleh masyarakat pada umumnya di dunia sebelum terbentuknya keluarga sebagai penerus kebudayaan. Levy dan Fallers (1959 : 647-651) mengelompokkan fungsi keluarga menjadi 4 kategori yang terlihat secara universal. *Pertama* setelah sebagai lembaga yang mengatur dan menyalurkan kebutuhan manusia akan seks, yaitu memantapkan legalitas kedudukan seorang ayah untuk anak-anak dari seorang wanita, dan legalitas seorang ibu bagi anak-anak dari seorang laki-laki. Sekaligus mengatur hak monopoli untuk menerima kedudukan-kedudukan resmi yang diwarisi dari ayah dan ibu serta kerabat kerabat mereka. *Kedua*, keluarga adalah dasar erkulturasi bagi generarsi untuk menerima kedudukan-kedudukan resmi yang diwarisidari ayah dan ibu serta kerabat-kerabatnya. *Ketiga*, keluarga adalah sebagai suatu organisasi kesatuan pembagian kerja antara kedua

pasangan, pengaturan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lain, serta kepemilikan harta benda yang diperoleh sendiri atau bersama. *Keempat*, menghubungkan kedua pasangan dan anak-anak mereka ke dalam jaringan hubungan sosial yang lebih luas dengan kerabat-kerabat mereka, yaitu melalui pemantaban hubungan sosial karena keturunan dan perkawinan.

Kemudian oleh Levy dikemukakan bahwa :

1. Belum pernah ada kasus dimana suatu masyarakat tidak memiliki keluarga sebagai sub system sosialnya.
2. Belum pernah ada suatu masyarakat, dimana individu-individunya tidak memiliki kedudukan atau istilah-istilah panggilan dalam struktur keluarga.
3. Belum pernah ada suatu masyarakat, dimana pengetahuan substansial dan kedudukan sebagai lembaga pendidikan paling dasar tidak diperoleh dari keluarga.

Sebelum terbentuk keluarga ada suatu proses yang disebut dengan perkawinan dan hal ini akan tersosialisasi dan bahkan terlembaga didalam kehidupan masyarakat. Karena sosialisasi membentuk kebiasaan, keinginan, dan adat istiadat kita. Tata cara dan kebiasaan merupakan penghemat waktu yang hebat karena keduanya membantu kita dalam mengambil sekian banyak keputusan.

Melalui sosialisasi seseorang menginternalisasikan norma-norma, nilai-nilai dan hal-hal tabu dalam masyarakat yang berarti pula menginternalisasikan semua hal tersebut berarti menjadikannya bagian dari perilaku otomatis seseorang yang dilakukannya tanpa pikir. Orang yang menginternalisasikan suatu nilai secara penuh akan menerapkan nilai tersebut meskipun tidak ada seorangpun yang melihatnya, karena keinginan untuk melanggar nilai tersebut sangat kecil kemungkinannya timbul di benak orang tersebut.

Sehingga dalam membentuk keluarga masyarakat akan mensahkan bila sudah terjadi perkawinan. Hal inilah yang menjadi dasar dari terbentuknya keluarga, karena tanpa melalui perkawinan maka masyarakat tentu tidak akan mengakui sebuah keluarga karena semuanya sudah terinternalisasi dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat mengakui bahwa sebelum ada keluarga harus melalui proses perkawinan terlebih dahulu. Menurut Abu Ahmadi (1991:243) terdapat tahap yang dilalui pasangan sebelum menikah yaitu ; 1) Perkenalan 2) Pacaran 3) Pertunangan 4) Perkawinan.

Tetapi ternyata perkawinan banyak juga dilakukan oleh mahasiswa yang nota bene berpikiran maju. Kebanyakan pernikahan mereka adalah nikah siri walaupun secara siri mereka menikah pada usia yang masih sangat muda. Menurut Edi Nur Hasmi (psikolog dan juga Direktur Remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN bahwa kestabilan emosi biasanya terjadi pada usia 24 tahun. Karena pada usia inilah seseorang memasuki usia dewasa. Masa remaja, biasa dikatakan baru berhenti pada usia 19 tahun. Batasan secara psikologis seseorang dikatakan mulai memasuki masa kedewasaan adalah usia 20 – 24 tahun, yang dikatakan sebagai dewasa muda atau *Lead Edolesen*.

Maka jika pernikahan dilakukan di bawah usia 20 tahun secara emosi remaja masih ingin berpetualang mencari jati dirinya. Akibatnya secara mental adalah depresi berat yang menyerang pasangan muda ini (Go id?hqweb/map123 dampak.html).

Mahasiswa UNS ada beberapa yang sudah menikah walaupun data untuk mengetahui berapa yang sudah menikah tidak ada secara resmi. Sehingga penulis ingin mendalami lebih jauh mengapa mereka melakukan pernikahan pada saat usia mereka masih sangat muda, dan bagaimana dampaknya terhadap perempuan?

## B. Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah yang penulils kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa mengapa mahasiswa melakukan pernikahan siri dan bagaimana dampaknya bagi perempuan ?

## C. Tinjauan Pustaka

### 1. Nikah Siri

Nikah siri atau sering disebut dengan dibawah tangan artinya nikah secara rahasia. Disebut rahasia karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi muslim atau ke Kantor Catatan Sipil bagi non muslim. Biasanya nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak belum siap melakukannya namun di pihak lain untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut penelitian yang dilakukan MISPI dalam Rindang Edisi Agustus 2009 ada 4 hal yang melatar belakangi mengapa seseorang melakukan nikah siri :

1. Pasangan yang melakukan nikah siri tidak tahu dampak dari hukum dari nikah siri.
2. Proses administrasi pernikahan dianggap terlalu sukar.
3. Bagi para pria yang ingin menikah lagi tetapi tidak mendapat persetujuan dari sitri pertama agar tidak jatuh zina maka biasanya melakukan nikah siri.
4. Dari asal baik laki-laki yang akan menggelar nikah siri tidak punya I'tikad baik untuk membentuk suatu keluarga.

Secara hukum positif, nikah siri tidak lengkapnya suatu perbuatan hukum karena tidak tercatat secara resmi dalam catatan resmi pemerintah. Demikian juga anak yang lahir dari pernikahan siri ini, dianggap tidak dapat dilegalisasi oleh Negara melalui akte kelahiran. Sebagaimana kita ketahui, setiap warga Negara Indonesia yang melakukan pernikahan harus mendaftarkan pernikahannya ke KUA atau Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan surat/Akta

Nikah. Sesuai dengan pasal 5 kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, suatu perkawinan harus tercatat. Pasal 7 aturan tersebut juga menyebutkan perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Menurut Rika Kurnia, dampak hukum yang timbul dari sebuah pernikahan siri akan terjadi kalau ada perceraian, si istri sulit untuk mendapatkan hak atas harta bersama mereka apabila si suami tidak memberikan. Selain itu, jika ada warisan yang ditinggalkan suami karena suami meninggal dunia istri dan anak sangat sulit mendapatkan hak dari harta warisan. Jika suami berprofesi sebagai PNS baik si istri maupun anak tidak berhak mendapat tnjangan apapun.

Menurutnya sering juga dijumpai hak-hak anak di keluarga yang melakukan nikah siri terabaikan. Karena tidak juga para pria yang melakukan nikah siri tidak mau bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan kebutuhan si anak. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri biasanya juga kesulitan mendapatkan akte kelahiran sebab orang tuanya tidak mempunyai akte nikah. Dan yang paling pokok adalah nikah siri tidak dapat disahkan oleh Negara.

Dampak sosial yang ditimbulkan dari nikah siri ini biasanya sebuah pernikahan siri akan dinilai masyarakat sebagai sebuah perkawinan yang tidak ideal dan tidak membuat suasana rumah tangga yang harmonis.

### 2. Posisi Perempuan

Sejarah telah memnorehkan bagaimana perempuan diperlakukan secara nista. Ia tak lebih dari separoh harga laki-laki bahkan tak jarang ia diperlakukan seperti sebuah barang yang bisa dimainkan seenaknya oleh pemiliknya. Kalangan elit Yunani kuno menempatkan sebagai makhluk tahanan yang disekap dalam istana sedangkan kalangan bawahan memperlakukannya

sebagai barang dagangan yang bisa diperjual belikan. Peradaban Romawi menempatkan sepenuhnya berada di kekuasaan ayahnya dan setelah menikah maka kekuasaan tersebut pindah ke tangan suaminya. Bahkan kekuasaan ini sangat mutlak, sang suami berhak untuk menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Masyarakat Hindu pra abad ke 17-an masehi sering menjadikan perempuan sebagai sesajen para dewa, sedang pada masyarakat Cina masih melanggengkan petuah-petuah kuno yang tidak memanusiakan perempuan. Ajaran Yahudi menganggap perempuan sebagai sumber laknat karena telah menyebabkan adam (sebagai symbol laki-laki) terusir dari surga. Tradisi Arab Jahiliyah menghalalkan pembunuhan seorang bayi hanya karena ia lahir sebagai bayi perempuan (Srinthil No 2 tahun 2003).

Tetapi ada juga kontradiksi simbolisasi perempuan yang digambarkan seperti misalnya bumi Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke selain disebut tanah air, sering pula dijuluki Ibu Pertiwi. Tetapi sayangnya simbolisasi seperti ini sering dimanfaatkan oleh laki-laki sebagai pemanis untuk menenangkan perempuan, atau sebagai pembungkus nilai-nilai patriarki yang sebenarnya lebih mewarnai hubungan laki-laki dan perempuan di masyarakat. Sehingga pengakuan dan penghargaan seperti ini seringkali dibelokkan untuk memberi penegasan bahwa tempat yang cocok bagi perempuan adalah rumah. Konsekwensi ekstrim dari pengkotakan seperti ini adalah perempuan tidak layak masuk ke ranah public. (muhadjir Darwin, 2005 : 24)

Praktik poligami sangat lazim dilakukan bagi priyayi, bahkan perempuan menganggap memperoleh berkah jika diijadikan "garwo selir" oleh bangsawan. Seorang istri harus rela jika suaminya ingin berpoligami. Istri yang baik, bahkan harus rela jika suaminya "jajan" ketika ia tidak bisa melayani suaminya, misalnya sedang menyusui sampai bayi berumur 2 tahun.

Seperti juga dikatakan oleh Aristoteles adalah wajar bahwa laki-laki dewasa menguasai budak-budak, anak-anak dan wanita. Laki-laki dewasa menguasai budak karena budak memang dikodratkan untuk menjadi budak. Laki-laki dewasa menguasai anak-anak yang bukan budak karena anak-anak belum berkembang jiwanya. Laki-laki menguasai wanita karena jiwa wanita memang tidak sempurna. (Arif Budiman, 1980 : 6)

Ide tentang wanita lebih lemah dari laki-laki terus dipertahankan dan terus disebarkan oleh hampir semua ahli filsafat sepanjang sejarah manusia. Bahkan penindasan ini seolah-olah legitimate karena keberadaan system beserta konstruksi sosialnya yang telah di setting sedemikian rupa sehingga membuat perempuan nyaris tanpa kuasa untuk melawan system itu. Sebutlah misalnya seorang istri harus patuh kepada suami, walaupun sebenarnya ia tidak bersedia, karena menolaknya berarti menentang adat atau tradisi bahkan agama.

Satu pandangan menyebut bahwa agama atau doktrin-doktrin keagamaan yang meliputi pikiran-pikiran para penafsir agama, disamping kekuasaan politik Negara dan ideology-ideologi dominan yang hegemonic, dianggap sebagai pihak yang turut serta menghegemoni dan melanggengkan kebudayaan tersebut. Agama dalam masyarakat religious seringkali, kalau tidak selalu, menjadi kekuatan besar yang membentuk sejarah atau kebudayaan manusia. Intervensi agama ini setidaknya karena terdapat teks-teks agama yang memberikan legitimasi dan justifikasi atas persoalan-persoalan tersebut. (Khoirul Mustafa dalam SRINTHIL 2003)

Demikian banyaknya cerita di atas menggambarkan bahwa perempuan selalu didominasi laki-laki oleh superioritasnya terhadap perempuan. Juga tidak berbeda dengan posisi perempuan dalam perkawinan sebagian besar berada dalam kungkungan hegemoni laki-

laki. Ada banyak kedudukan perempuan yang menjadi tidak berdaya dalam menghadapi perkawinan baik secara fisik maupun psikologis.

Posisi perempuan yang lemah dalam perkawinan dapat dilihat dalam berbagai latar belakang :

1. Perempuan dalam perkawinan didasarkan untuk memperlakukan perempuan sebagai obyek seks laki-laki dan penghasil keturunan.
2. Masih banyak perkawinan didasarkan pada perjodohan, seperti kisah Siti Nurbaya, sebuah contoh yang sangat baik untuk menggambarkan bagaimana posisi perempuan sangat rendah dan rentan sebagai makhluk yang bebas. Perempuan dalam konteks ini tidak mempunyai kekuatan untuk membela diri.
3. Perempuan dalam perkawinan yang didasarkan pada peristiwa psikologis yang oleh Collette Dowling disebut sebagai Cinderella Complex. Sebagian perempuan dalam rasionalitasnya mendambakan kehadiran laki-laki yang diyakininya sebagai seorang pangeran dalam cerita Cinderella yang akhirnya membawanya pada jenjang perkawinan.
4. Perempuan dalam perkawinan didasarkan pada mitos perawan tua. Banyak orang tua menginginkan anaknya untuk tidak menjadi perawan tua. Menjadi perawan tua bagi kebanyakan masyarakat dianggap sebagai bentuk kekurangan yang terjadi pada diri perempuan. Untuk itu, dalam bayangan ketakutan yang tidak beralasan banyak orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda.

Ilustrasi-ilustrasi yang digambarkan tersebut, bila disadari, menggambarkan posisi perempuan dalam perkawinan lebih didominasi oleh nuansa keharusan untuk tunduk ketimbang sebagai sebuah kehendak untuk melakukan atas kesadaran

dirinya. Perkawinan merupakan keharusan yang harus dijalani atas nama kekuasaan patriarkhi.

### 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang mahasiswa yang melakukan nikah siri. Menurut Bogdan an Taylor (1992) bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

Sumber data diperoleh dari informan yang didapat melalui tehnik wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber tertulis, dengan tujuan untuk menambah atau melengkapi hasil penelitian ini. Daftar sekunder dapat berupa kepustakaan, serta data-data lain yang bersifat menunjang.

Tehnik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni observasi, wawancara mendalam dengan mahasiswa yang sudah nikah siri. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan. Penyusunan pokok-pokok ini dilakukan sebelum wawancara dilakukan. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk tentang garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya. Selain itu juga menggunakan dokumen dengan cara mengadakan pencatatan data dari dokumen yang ada dan menghimpun data yang ada. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bukan untuk meramalkan.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa muslim yang menjalankan nikah siri. Sedangkan sampel

diambil dari populasi yang diketahui peneliti yang dapat menjadi sumber informasi data yang diinginkan dan diperlukan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa yang telah melakukan nikah siri baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu tehnik penentuan sampel untuk tujuan-tujuan tertentu saja. Sampel ditentukan berdasarkan pada ciri-ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan populasi. Peneliti dengan sengaja menentukan anggota sampelnya berdasar kemampuannya dan pengetahuan tentang keadaan populasi.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Fenomena nikah siri, yang saat ini, banyak melibatkan mahasiswa sebagai pelaku tentu mempunyai dampak. Mengenai latar belakang atau alasan terlaksananya nikah siri adalah memberikan gambaran bahwa konsep nikah siri bukan hanya menjadi budaya bagi sebagian kelompok agama, namun sudah merambah di kalangan akademisi khususnya mahasiswa.

Alasan menikah siri bisa dibagi dua :

1. Ekonomi
 

Pihak pasangan memiliki kelebihan dalam hal kondisi ekonomi.
2. Agama
  - a. Terlibat dalam organisasi keagamaan dan memiliki peran khusus dalam organisasi keagamaan di rumah maupun lingkungan kampus, sehingga tidak menganut budaya pacaran.
  - b. Memiliki keluarga dengan latar belakang agama Islam yang ketat.
  - c. Latar belakang ekonomi keluarga yang kurang mampu.
  - d. Informan membutuhkan biaya untuk menanggung beban biaya kuliah.

Motivasi informan :

1. Internal
 

Pertimbangan informan untuk menjalin hubungan berdasarkan pada aturan agama yang dianutnya.
2. Eksternal
  - a. Pertimbangan kondisi ekonomi orang tua yang belum mampu membiayai pernikahan di KUA beserta resepsinya.
  - b. Pihak pasangan memiliki kemampuan kondisi ekonomi dan agama.
  - c. Dorongan dari pihak keluarga informan atas dasar pertimbangan aturan agama.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya konsep nikah siri seperti yang dijalankan oleh sebagian masyarakat sangat beragam, mulai dari dampak positif dan negative. Secara umum beberapa dampak positif dari nikah siri yang dilaksanakan dengan tujuan yang baik adalah :

1. Mengurangi beban atau tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarga.
2. Meminimalisasi adanya sex bebas, serta berkembangnya penyakit AIDS maupun penyakit lainnya.
3. Mampu menghindarkan seseorang dari hukum zina dalam agama.

Ketiga dampak positif konsep nikah siri tersebut berhubungan dengan dampak yang mengarah pada faktor ekonomi, kesehatan serta faktor agama. Untuk beberapa hal tersebut, nikah siri dapat dipandang memberikan solusi bagi sebagian orang yang memiliki tujuan baik atas konsep nikah siri yang dijalaninya. Namun konsep nikah siri jika dipandang lebih luas, dan menyangkut hak-hak wanita, maka hal tersebut akan lebih banyak menimbulkan dampak negative atau merugikan. Dampak negative tersebut antara lain :

1. Tidak adanya kejelasan status wanita sebagai siri dan kejelasan status anak baik di mata hukum Indonesia, maupun di mata masyarakat sekitar.
2. Akan ada banyak kasus poligami terjadi.
3. Pelecehan seksual terhadap wanita karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki.
4. Pihak wanita tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suami jika terjadi permasalahan atau perceraian, karena konsep nikah yang dijalani tidak sah secara hukum atau tidak tercatat di Lembaga Perkawinan (KUA)

Dari uraian tentang dampak negatif tersebut, cukup memberikan kejelasan bahwa konsep nikah siri lebih membawa dampak kerugian khususnya bagi kaum perempuan. Realitas tentang konsep rumah tangga yang dijalankan tanpa publikasi terhadap masyarakat setempat, dapat menimbulkan berbagai penilaian yang beragam. Penilaian tersebut, yang dapat mempengaruhi informasi ketika beraktifitas serta berinteraksi dengan masyarakat setempat. Dampak yang timbul adalah ketidaknyamanan ketika berada di lingkungan publik memang permasalahan yang tidak Nampak, namun hal tersebut dapat memberikan pengaruh bagi pelaku nikah siri untuk menutup diri dari masyarakat setempat.

Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa fenomena nikah siri lebih dominan berhubungan dengan latar belakang alasan agama (Islam), berhubungan dengan ekonomi, serta berdampak pada penilaian masyarakat. Konsep pernikahan siri merupakan hasil dari ketidaksiapan individu dalam menjalani konsep rumah tangga. Ketidaksiapan tersebut menyangkut usia, kondisi mental, serta kondisi yang berhubungan dengan faktor kemampuan ekonomi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun informan sudah dinyatakan sah secara agama telah menikah, namun konsep rumah tangga yang mereka jalani

tidak diperkuat dengan tuntutan hak dan kewajiban antara suami istri, yaitu hak menyangkut nafkah lahir bathin.

Kekurangan lain yang ditunjukkan oleh adanya nikah siri adalah tidak adanya tuntutan terkait kewajiban menjalankan peran sebagai suami atau istri. Terlebih lagi informan tidak menjalankan rumah tangga dalam satu atap. Hal inilah yang menunjukkan bahwa nikah siri adalah sesuatu yang sebagian orang bisa berpendapat sah, meskipun konsep nikah siri memiliki banyak kekurangan.

#### D. Kesimpulan

Pada saat ini banyak sekali ditemukan nikah siri yang dilakukan oleh mahasiswa. Meski pernikahan ini sah menurut agama tetapi sangat merugikan perempuan. Karena sebenarnya tujuan membentuk keluarga yang dimulai dengan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dengan kebahagiaan akan menciptakan ketenangan dan kebahagiaan bagi yang telah mampu melaksanakannya.

Sementara itu nikah siri sering disebut nikah dibawah tangan artinya nikah secara rahasia karena tidak dilaporkan ke KUA atau catatan sipil bagi yang non muslim. Biasanya nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak belum siap meresmikannya. Namun di pihak lain untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjurus ke hal-hal yang dilarang agama.

Dalam MISPI yang meneliti tentang nikah siri yang dilakukan di ACEH ada 4 hal yang mendasari nikah siri :

1. Pasangan yang mau menikah siri tidak tahu dampak hukum dari nikah siri.
2. Proses administrasi pernikahan dianggap terlalu sukar.
3. Bagaimana para pria yang ingin menikah tetapi tidak mendapat persetujuan dari istri pertama, agar tidak jatuh pada zina kemudian mereka melakukan nikah siri.

4. Dari awal, baik si wanita dan laki-laki yang akan menggelar nikah siri tidak punya itikad baik untuk membentuk suatu keluarga.

Dalam penelitian ini tidak jauh berbeda hasilnya bahwa mereka tetap melakukan nikah siri karena tidak berpikir jika suatu saat hubungan mereka putus karena ketidakcocokan di tengah hubungan mereka. Sementara itu mereka sudah sah menurut agama. Di benak informan yang melakukan nikah Sementara itu mereka sudah sah menurut agama. Di benak informan yang melakukan nikah siri yakin bahwa hubungan mereka akan sampai pada hubungan resmi yang sahkan Negara.

Jadi pada dasarnya pernikahan siri yang telah dilakukan hanyalah sementara mereka tetap akan melaksanakan di hadapan KUA jika sudah siap melakukannya. Didalam penelitian ini jika kedua pasangan ini sudah lulus karena mereka melakukan itu masih berstatus mahasiswa. Sementara itu informan yang lain menyatakan bahwa pernikahan mereka didorong oleh alasan ekonomi dengan menikah siri beban yang harus ditanggung orang tua mereka menjadi lebih ringan. Tampaknya perempuan lagi hanya menjadi beban bagi suami mereka sehingga perempuan bisa diperlakukan semena-mena karena boleh bergantung pada suami mereka. Apalagi dalam penelitian yang tengah dilakukan bahwa laki-laki dan keluarganya lah yang wajib menafkahi pihak perempuan.

## Daftar Pustaka

- Abu ahmadi, 1992, Psikologi Sosial. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Arif Budiman. 1982. Pembagian Kerja Secara Sexual. PT Gramedia. Jakarta.
- Horton Paul & Hunt, Chester L. 1996. Sosiologi. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Lexy J Moleong. 1995. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Miles, Mathew B & A Michel huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. UI Press. Jakarta.
- Muhadjir Darwin. 2005. Negara dan Perempuan. CV Adipura. Yogyakarta.
- Non Name. 1995. Proses Sosialisasi Anak Dalam Keluarga Poligini. CV Eka Putra. Jakarta.
- William J Goode. 1985. Sosiologi Keluarga. PT Bina Aksara. Jakarta.
- Jurnal :
- Jurnal Perempuan no 22 th 2002. Memikirkan Perkawinan
- Srinthil no 2 th 2003. Perempuan Tayub.

# KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA DAN SALURAN REKRUTMEN

Sudarsana  
Sosiologi  
FISP Universitas Sebelas Maret

## **Abstract**

*The employment service shall be so organized as to ensure effective recruitment and placement, and use refers to available employment applicants with suitable skill and physical capacity.*

*Source of recruitment are: job posting, skills inventory, referalls, walk-in, writes-in, campus recruitment, education. Institute, open house, advertising, agent of man power placement, and management consultant institute.*

**Key words** : *employment, source of recruitment.*

## **A. Pendahuluan**

Pertumbuhan angkatan kerja adalah lebih dikarenakan oleh "trend" kependudukan di masa lalu dan juga sebagai tanggapan dari suatu keadaan perekonomian. Sehingga boleh disebut bahwa perubahan karakteristik angkatan kerja adalah karena unsur kependudukan dan unsur ekonomis secara bersama-sama. Angkatan kerja yang besar jumlahnya adalah cermin dari jumlah penduduk yang besar pula. Sehingga makin besar jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Untuk menuju tercapainya keadaan yang seimbang maka sebaiknya mereka semuadapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan serta ketrampilan mereka. Hal ini tentu berkonsekuensi perekonomian dapat menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru.

Salah satu masalah yang biasa timbul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja

pada suatu tingkat upah tertentu. Ketidakseimbangan ini dapat berupa : (a) lebih banyaknya penawaran dibanding permintaan terhadap tenaga kerja dan (b) lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja. Keadaan yang umumnya terjadi adalah lebih besarnya penawaran dibanding permintaan terhadap tenaga kerja. Hal ini berarti, pada suatu tingkat upah tertentu, di suatu lapangan pekerjaan, maka jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk dipekerjakan lebih banyak dibanding dengan jumlah orang yang diminta untuk bekerja.

Sehubungan lebih besarnya penawaran dibanding permintaan terhadap tenaga kerja, juga mempunyai makna yaitu besarnya angka pengangguran yang disertai sulitnya mencari pekerjaan atau tersedianya lowongan pekerjaan baik di instansi pemerintah maupun swasta. Dari situasi seperti itulah menimbulkan salah satu perkembangan baru dalam bidang ketenagakerjaan yaitu tumbuh dan beroperasinya perusahaan-

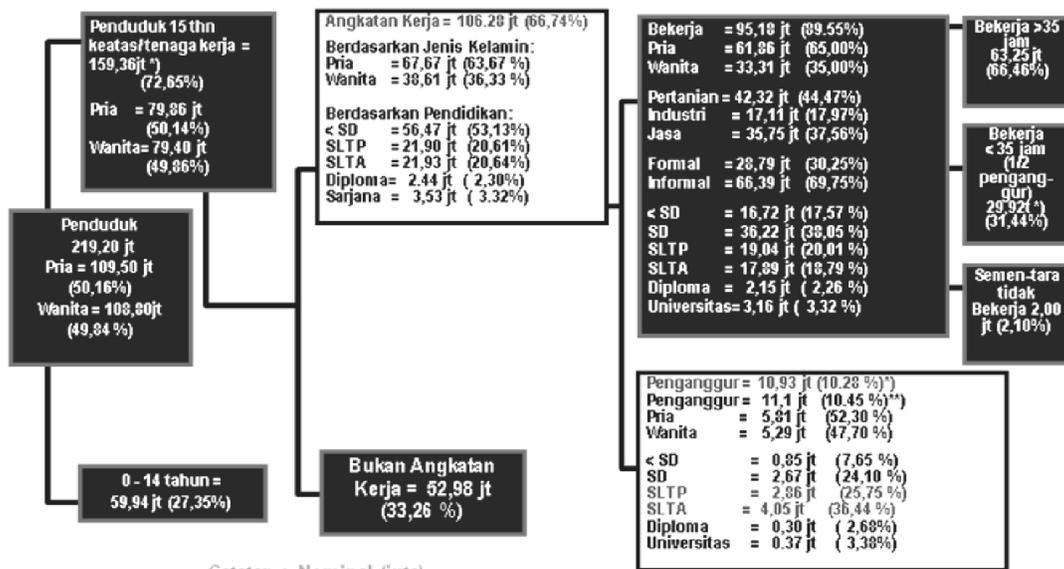
perusahaan/lembaga. Lembaga swasta yang bergerak di bidang jasa, yaitu mencari dan selalu menyalurkan tenaga kerja. Oleh sebab itu menarik sekali untuk dikaji sumber yang dapat digunakan untuk penarikan karyawan.

**B. Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia**

Pembangunan sektor ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia, oleh sebab itu implementasi perluasan kerja dan pe-

nempatan sumber daya manusia merupakan program Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Tenaga kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang sedang bekerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan, angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan disebut sebagai penganggur. Untuk lebih jelasnya dapat dipaparkan tentang kondisi ketenagakerjaan Indonesia.

**Kondisi Ketenagakerjaan Di Indonesia**



Catatan : Nominal (juta)  
 \*) Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2006  
 \*\*) Sumber: BPS, Sakernas Feb. 2006

Dari gambaran kondisi ketenagakerjaan bahwa penduduk yang berusia 15 tahun ke atas sebesar 159,36 juta. Adapun yang bekerja sebesar 95,18 juta yang terdiri dari pria sejumlah 61,86 juta dan perempuan 33,31 juta. Dan penganggur sejumlah 11,1 juta yang terdiri dari pria sejumlah 5,81 juta dan perempuan 5,29 juta (Sakernas, Februari 2006).

Menurut Sugito Muarif (2000:289-290) tenaga kerja dapat diklasifikasikan bahwa tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja, dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Adapun bukan angkatan kerja adalah golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus

rumah tangga, dan golongan lain atau penerima santunan. Pendapat lain tentang tenaga kerja atau *man power* adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan melakukan pekerjaan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Di Indonesia, dipilih batas umur minimum 15 tahun tanpa batas maksimum. Dengan demikian secara konseptual tenaga kerja di Indonesia disimpulkan sebagai penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih (Payaman J. Simanjuntak, 1985:2).

Di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dinyatakan bahwa "tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat". Dari pengertian tersebut di atas masalah ketenagakerjaan terutama yang berhubungan dengan penawaran tenaga kerja, permintaan tenaga kerja dan pengangguran perlu mendapat perhatian yang serius. ILO dalam mengatasi masalah pengangguran menerbitkan konvensi ILO No. 88 dan telah ditindaklanjuti pemerintah dengan meratifikasi melalui Keppres No : 36 Tahun 2002 yang mengatur tentang pelayanan penempatan tenaga kerja. Untuk diperoleh penempatan tenaga kerja secara optimal maka tuntutan akan kualitas tenaga kerja menjadi penting dan strategis dalam perekrutan dan penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. Maka dari itu pengisian lowongan kerja adalah salah satu konsekuensi dari era globalisasi adalah internasionalisasi, di semua bidang kehidupan, khususnya di dunia kerja. Saat ini standar yang dipergunakan bukan lagi bersifat lokal, tetapi bersifat Internasional, artinya patokan-patokan yang dipakai harus dapat diterima oleh semua negara di dunia. Dengan demikian dunia pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang dapat memenuhi tuntutan dunia global. Namun demikian masih dijumpai mengenai permasalahan pokok tenaga kerja :

- Banyak keluhan atas mutu tenaga kerja Indonesia.
- Banyak keluhan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja.
- Banyak lulusan Sekolah Menengah Umum dan Perguruan Tinggi yang menganggur.
- Banyak tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan tetapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
- Kenyataannya banyak industri di Indonesia yang menawarkan lowongan kerja, tidak terpenuhi.
- Kesempatan kerja di luar negeri banyak yang terlewatkan.

Hal tersebut di atas terjadi karena adanya *mismatch* pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Ini ditandai adanya permintaan terhadap tenaga kerja terdidik lebih cepat daripada permintaan terhadap total tenaga kerja secara keseluruhan, serta permintaan tenaga kerja terdidik lebih cepat daripada penawaran tenaga kerja terdidik. Oleh sebab itu disampaikan berbagai saluran atau sumber yang dapat digunakan untuk penarikan karyawan.

### C. Saluran Rekrutmen

Berbagai saluran atau sumber yang dapat digunakan untuk penarikan karyawan adalah :

#### 1. Job Posting

*Job Posting means publicizing the open job to employees (often by literally posting it on bulletin boards or intranets) an listing the job's attributes, like qualifications, supervisor, work schedule, and pay rate. (Gary Dessler, 2005:162)*

*Job Posting* berarti mengumumkan lowongan kerja kepada pencari kerja secara terbuka (seringkali diumumkan pada papan-papan bulletin atau internet) dan daftar keterangan tersebut seperti kualifikasi, supervisor, jadwal kerja dan tingkat upah.

#### 2. Persediaan keahlian (*skills inventory*)

Salah satu bentuk perusahaan swasta yang bergerak di bidang pencarian dan penempatan tenaga kerja ialah perusahaan yang mengkhususkan diri pada pencarian tenaga kerja profesional. Berbeda dengan perusahaan penempatan tenaga kerja, perusahaan pencari tenaga kerja profesional mengkhususkan diri pada tenaga kerja tertentu saja, misalnya tenaga eksekutif atau tenaga profesional lainnya yang memiliki pengetahuan atau keahlian khusus. (Sondang P. Siagian, 2002:119)

### 3. Rekomendasi Karyawan (*referrals*)

Biasanya dengan rekomendasi tertentu dari karyawan dalam organisasi yang bersangkutan, yang pada dasarnya merupakan *servicing* pendahuluan. Bahwa tentu yang bersangkutan memenuhi syarat, namun paling tidak sudah sedikit ada jaminan tentang kemungkinan kemampuan atau kecakapannya karena rekomendasi tersebut tentunya tidak sembarangan saja. Namun kelemahannya adalah kemungkinan timbulnya "klik-klik". (Susilo Martoyo, 1998:30)

### 4. *Walk-in*

Pelamar atau pencari kerja datang sendiri ke perusahaan dan kemudian mengisi blanko lamaran yang telah disediakan. Lamaran-lamaran ini disimpan dalam suatu file sampai ada lowongan pekerjaan atau sampai lamaran dinyatakan tidak valid lagi. (T. Hani Handoko, 2001:74)

### 5. *Writes-in*

Sumber lain yang wajar dipertimbangkan adalah lamaran tertulis yang dikirimkan oleh para pelamar. Sebagaimana halnya dengan lamaran langsung, para pelamar yang mengirimkan lamarannya secara tertulis mungkin hanya mencoba saja tanpa mengetahui secara pasti apakah dalam organisasi yang menjadi alamat lamarannya ada lowongan atau tidak. (Sondang P. Siagian, 2002:113-114)

### 6. Rekrutmen dari Perguruan Tinggi

*The campus recruiter has two primary goals. The main one is to determine whether a candidate is worthy of further consideration. Exactly which traits to look for will depend on your company's specific needs. Usual traits to access include communication, skills, education, experience, and interpersonal skills.*

*The other aim is to attract good candidates. A sincere and informal attitude, respect for the application as an individual,*

*and prompt follow-up letters can help sell the employer to the interviewee.* (Gary Dessler, 2005:173)

Rekrutmen melalui kampus mempunyai 2 tujuan pokok. Tujuan pokok pertama adalah menentukan apakah seorang calon pantas dipertimbangkan lebih lanjut. Ciri-ciri yang pasti tergantung pada kebutuhan spesifik perusahaan. Ciri-ciri biasa termasuk ketrampilan berkomunikasi, pendidikan, pengalaman, dan ketrampilan interpersonal.

Tujuan lainnya adalah menarik calon-calon yang baik. Sikap jujur secara tidak langsung, menghormati permohonan secara individual dan menindaklanjuti surat dengan tepat dapat membantu pencari kerja dapat diterima untuk diwawancarai.

### 7. Lembaga Pendidikan

Lembaga-lembaga pendidikan jelas merupakan salah satu sumber utama rekrutmen tenaga kerja baru, baik yang menyelenggarakan pendidikan umum maupun pendidikan kejuruan. Perlu ditekankan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pendidikan sebagai sumber rekrutmen tenaga kerja baru ialah yang menyelenggarakan pendidikan tingkat sekolah tingkat atas dan pendidikan tinggi. Pembatasan ini didasarkan pada pemikiran bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada tingkat sekolah dasar meluluskan anak-anak yang belum layak diperlakukan sebagai pencari lapangan kerja. (Sondang P. Siagian, 2002:120)

### 8. *Open House*

Suatu teknik penarikan yang relative baru adalah menyelenggarakan *open house*. Orang-orang di sekitar perusahaan diundang untuk mengunjungi dan melihat fasilitas-fasilitas perusahaan, memperoleh penjelasan-penjelasan dan mungkin

menonton pemutaran film mengenai perusahaan. Dengan cara ini, orang-orang diharapkan tertarik untuk bekerja di perusahaan. Metode ini terutama berguna untuk menarik para karyawan dengan ketrampilan yang langka, atau dengan kata lain sumber suplainya terbatas. (T. Hani Handoko, 2001:78)

9. Iklan disebut juga dengan advertensi, merupakan berita atau pengumuman singkat yang dimuat oleh surat kabar, majalah dan dapat pula disiarkan melalui radio, televisi dan sebagainya. Adapun sasaran iklan adalah orang-orang atau bakal-bakal calon sumber daya manusia yang memenuhi syarat, agar mereka tertarik untuk mengajukan lamaran kepada perusahaan, bila yang bersangkutan memang memenuhi persyaratan seperti yang dimuat dalam iklan dimaksud. (Gouzaali Saydam, 2000:92)

#### 10. Agen Penempatan Tenaga Kerja

Salah satu perkembangan baru dalam dunia ketenagakerjaan ialah tumbuh dan beroperasinya perusahaan-perusahaan swasta yang kegiatan utamanya adalah mencari dan menyalurkan tenaga kerja. Pada mulanya, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ketenagakerjaan tersebut lahir sebagai pelengkap kantor tenaga kerja milik pemerintah. Dalam perkembangan selanjutnya pun perusahaan-perusahaan swasta tersebut bekerja sama dengan instansi pemerintah dimaksud. (Sondang P. Siagian, 2002:117-118)

#### 11. Perusahaan Konsultan Manajemen

Makin maju suatu masyarakat, makin banyak pula organisasi profesi yang dibentuk seperti di bidang kedokteran, teknik, ahli ekonomi, ahli administrasi, ahli hukum, ahli pekerja sosial, ahli statistik, ahli matematika, ahli komunikasi, ahli pertanian, dan lain sebagainya. Tidak ja-

rang berbagai organisasi profesi berusaha memberikan bantuan kepada para anggotanya, baik yang lama maupun yang baru untuk memperoleh pekerjaan baru. (Sondang P. Siagian, 2002:123)

Selama ini untuk mengisi sebuah lowongan pekerjaan pada perusahaan swasta adalah lebih tepat dengan menggunakan saluran rekrutmen agen penempatan tenaga kerja. Agen penempatan tenaga kerja biasanya menyediakan pelayan informasi pekerjaan melalui papan-papan pengumuman atau penerbitan-penerbitan secara periodik (*job flow*) yang berisi daftar lowongan pekerjaan. Melalui saluran rekrutman agen penempatan tenaga kerja sesungguhnya dapat diperoleh beberapa keuntungan, yaitu agen penempatan tenaga kerja merupakan perusahaan yang mempunyai orientasi mencari laba/keuntungan dari jasa yang disediakan. Oleh sebab itu umumnya berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dan cepat kepada para pelanggannya (*user* atau perusahaan pengguna tenaga kerja). Begitu ada permintaan dari pihak *user* maka segera ditindak lanjuti dengan baik dan cepat. Dalam rangka pelayanan untuk memuaskan *user*, agen penempatan tenaga kerja akan berusaha mencari pelamar yang paling memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh *user*. Dengan demikian *user* dapat mengisi lowongan pekerjaan yang ada dengan sesegera mungkin dan dengan calon karyawan yang sungguh-sungguh memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

#### D. Kesimpulan dan Saran

Dari uraian di atas dapat disampaikan simpulan dan saran sebagai berikut :

- ☞ Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas/tenaga kerja sejumlah 159,36 juta. Adapun yang bekerja sebesar 95,18 juta yang terdiri dari pria sejumlah 61,86 juta dan perempuan 33,31 juta. Dan penganggur sejumlah 11,1 juta yang terdiri dari pria sejumlah 5,81 juta dan perempuan 5,29 juta.

- ✧ Saat ini standar yang dipergunakan bukan lagi bersifat lokal, tetapi bersifat Internasional, artinya patokan-patokan yang dipakai harus dapat diterima oleh semua negara di dunia.
  - ✧ Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
  - ✧ Ada sebelas saluran atau sumber yang dapat digunakan untuk penarikan karyawan.
  - ✧ Agen penempatan tenaga kerja biasanya menyediakan pelayan informasi pekerjaan melalui papan-papan pengumuman atau penerbitan-penerbitan secara periodik (*job flow*) yang berisi daftar lowongan pekerjaan.
- Selanjutnya dapat diajukan saran terhadap lulusan yang siap bekerja sebagai berikut :
- ✧ Memiliki skill dan knowledge yang sesuai dengan perkembangan dunia industri
  - ✧ Memiliki kompetensi-kompetensi yang membuat mereka siap kerja dan siap menghadapi perkembangan iptek/dunia kerja yang mungkin terjadi
  - ✧ Memiliki kemampuan berbahasa asing yang banyak digunakan dalam dunia industri
  - ✧ Memiliki skill dan knowledge yang memungkinkannya melakukan pembangunan dan pengembangan pada sumberdaya alam yang ada di Indonesia atau paling tidak di daerahnya.
  - ✧ Memiliki kemampuan untuk berperan sebagai entrepreneur/pengusaha yang tidak hanya memberi kesejahteraan bagi dirinya namun juga bagi masyarakat sekitarnya.

## Daftar Pustaka

- Anonimous, 2002. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 88 Mengenai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI.
- \_\_\_\_\_, 2006. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_, 2007. Sakernas, Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Dessler, Gary, 2005. Human Resource Management, International Edition, New Jersey: Pearson Education Internasional.
- Handoko, T. Hani, 2001. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi 2, Yogyakarta: BPFE.
- Martoyo, Susilo, 1998. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 3, Yogyakarta: BPFE.
- Muarif, Sugito, 2000. Pemahaman Bidang Ketenagakerjaan Buku I, Jakarta: Yayasan Bina Remaja Sejahtera.
- Saydam, Gouzali, 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia, Suatu Pendekatan Mikro, Jakarta: Djambatan.
- Siagian, Sondang P, 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara.
- Simanjuntak, Payaman J, 1995. Pengantar Sumberdaya Manusia, Jakarta: LDFE-UI.

# USAHA KAUM GAY PEDESAAN DALAM MENGEKSPRESIKAN JATI DIRINYA

Suyatmi  
Sosiologi

FISIP Universitas Sebelas Maret

## Abstract

*This research tries to uncover the way of rural gay in expressing their spirit as a homosexual, considering there still a tight norms, such as culture, religion and social norm.*

*This research has been done in sub province Karanganyar, considering the high mobility of the citizen and they still holding their culture, religion and social norm. There was a horrendous case about a lesbian that having an affair with the high school student and the family of the student brought this case to the police.*

*Even the lesbian didn't came from the sub province of Karanganyar but there's an indication about the hidden homosexual community in this sub province. They not just a pure homosexual but also the MSM (Men Who Have Sex With Man). This term use because some of people that have a sex with a man refused to categorize as a homosexual, some of them also married with a woman.*

*The object of this research is a gay, because they are open mind and easy to express themselves than a lesbian. The indicator factors that turn some people becoming homosexual are heredity (but its only a small case), sexual hormone imbalance and environmental factor.*

**Key words :** *gay, rural, community*

## A. Pendahuluan

Kaum Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender, lazim disebut LGBT. Keberadaan kaum LGBT ditengah masyarakat masih dianggap sebagai kaum minoritas dan sering mengalami diskriminasi baik di kehidupan keluarga, sosial kemasyarakatan, agama, dan berbagai lini kehidupan yang lain. Bahkan tidak jarang wujud diskriminasi tersebut muncul dalam bentuk penghinaan dan juga kekerasan, baik secara mental maupun fisik karena mereka dianggap melawan kodrat.

Diskriminasi yang diberikan tersebut menyebabkan mereka berperilaku eksklusif dengan membentuk kelompok atau komunitas tersendiri dan tersembunyi dari kehidupan publik atau komunitas underground.

Di beberapa negara, keberadaan kaum LGBT sudah dapat diterima dengan baik di tengah kaum heteroseksual. Di Belanda misalnya, sudah membuat dan mengesahkan Undang-undang yang mengatur tentang pernikahan sejenis. Di Amerika Serikat juga sudah dideklarasikan oleh Barack Obama dengan memuji kaum LGBT Amerika untuk sebuah kontribusi luar biasa serta memperkuat jalinan sosial Amerika. Obama juga menjamin kesamaan hak kaum LGBT Amerika termasuk mengetatkan hukum criminal kebencian, mendukung persatuan sipil, menjamin hak hak adopsi gay, menca- but perlindungan diskriminasi di lingkungan kerja, dan mengakhiri kebijakan Don't Ask, Don't Tell yang sering terjadi di lingkungan militer.

Di negara Iran, keberadaan kaum homoseksual sangat dilarang, namun tidak melarang warganya berganti jenis kelamin. Operasi jenis kelamin menjadi pilihan warga Iran untuk mendapatkan status yang lebih jelas. Ali Askar, salah satu warga Iran yang melakukan operasi kelamin, dan ia sebenarnya tidak merubah apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, terkait jenis kelaminnya. Namun kebijakan pemerintah Iran menyebabkan untuk melakukan operasi ganti kelamin. Pria yang kini bernama Negar itu mengakui adanya perlakuan kasar baik dari keluarga maupun kehidupan sosialnya. Ayahnya yang menolak keras homoseksual bahkan berniat untuk membunuhnya.

Perubahan jenis kelamin ini diizinkan oleh pimpinan spiritual revolusi Islam pada th 1979, Ayetollah Khomeini. Dengan adanya fatwa yang dikeluarkan oleh orang yang cukup dihormati masyarakat selama 30 tahun ini telah menjadikan Iran sebagai salah satu Negara yang paling banyak melakukan operasi ganti kelamin di samping Thailand. Di Indonesia, banyak pihak menganggap LGBT adalah sebagai gangguan jiwa atau deviasi seksual. Beberapa pelayanan kesehatan jiwa Departemen Kesehatan, mengatakan bahwa perilaku homoseksual seperti gay, lesbian dan biseksual lebih disebabkan oleh kultur dalam dirinya sehingga bersifat alamiah. Menurutnya, berdasar Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ), kaum homo dan lesbian tidak dikategorikan sebagai gangguan jiwa ataupun deviasi seksual, karena keadaan tersebut merupakan manifestasi seksualitas manusia sebagaimana halnya dengan heterogenitas dan biseksual.

Sedangkan dr. Lukas Mangindaan Sp KJ dalam seminar nasional "Seksualitas Yang Ditabukan: Tantangan Keberagaman" yang diselenggarakan di hotel Sahid Jakarta, bahwa homoseksualitas tidak lagi dikategorikan sebagai gangguan jiwa atau penyimpangan seksual, karena hal tersebut memberikan

dampak negative seperti stigmatisasi, dan pengucilan oleh masyarakat. Lukas menambahkan bahwa penghapusan paham Homoseksualitas sebagai gangguan jiwa adalah keputusan dari Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) pada 17 Mei 1990 dan sudah dicantumkan oleh Depkes RI dalam buku PPDGJ II (1983) dan PPDGJ III (1993).

Lukas menegaskan bahwa homoseksualitas maupun heteroseksualitas dikategorikan sebagai bagian dari identitas seseorang, dan identitas tersebut harus dibedakan dengan perilaku. Karena identitas bersifat netral dan harus diterima apa adanya

Sedangkan perilaku dapat bersifat positif, negative atau netral. Sehingga perlunya melihat identitas diri seseorang sebagai bagian dari keberagaman manusia dan bersikap pluralistic tanpa sikap apriori.

## B. Permasalahan

Dalam penelitian ini permasalahan yang muncul adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh kaum gay yang berasal dari pedesaan untuk mengekspresikan dirinya sebagai seorang gay atau MSM.

## C. Tinjauan Pustaka

Dede Utomo dalam bukunya "Memberi Suara Pada Yang Bisu" (2003;6-7) menjelaskan tentang pengertian homoseksualitas, yaitu : Orang homoseks adalah orang yang orientasi atau pilihan seks pokok atau dasarnya, entah diwujudkan atau dilakukan ataupun tidak, diarahkan kepada sesama jenis kelaminnya.

Atau : laki laki yang homoseks adalah laki laki yang secara emosional dan seksual tertarik kepada laki laki, dan wanita homoseks adalah wanita yang secara emosional dan seksual tertarik kepada wanita. Homoseksualitas mengacu dari kata Yunani yang berarti Homoio atau sama, dan dari bahasa Latin sexus yang berarti jenis kelamin. Istilah ini merupakan pengertian umum mencakup banyak macam kecenderungan seksual ter-

hadap jenis kelamin yang sama atau keterarahan pada jenis kelamin yang sama (homotropie, tropos yang berarti arah atau haluan).

Terminologi lain, yaitu homofili yang berasal dari kata *philein*, berarti mencintai. Homofili sendiri dapat diartikan secara umum sebagai pria atau wanita, tua atau muda, yang tertarik atau jatuh cinta pada orang yang berjenis kelamin sama, dengan tujuan mengadakan persatuan hidup, baik untuk sementara atau selamanya. Dalam persatuan ini mereka menghayati cinta dan menikmati kebahagiaan seksual yang sama seperti yang dialami para heteroseksual.

### 1. Pengertian Homoseksual

Homoseksual sendiri diartikan sebagai suatu keinginan untuk membina hubungan romantis atau hasrat seksual dengan sesama jenis. Jika terjadi pada wanita disebut lesbian. Homoseksual berbeda dengan transseksual atau banci. Transseksual masih termasuk dalam kategori gangguan jiwa jenis frekuensi seksual. Kaum homoseksual tidak pernah mengganti jenis kelaminnya, tapi transseksual atau banci memiliki keinginan untuk menolak jenis kelaminnya.

### 2. Pengertian Homoseksualitas

Homoseksualitas mengacu pada rasa tertarik secara perasaan (kasih sayang, hubungan emosional) dan atau secara erotik baik secara perekonomian (lebih menonjol) mau pun eksklusif (semata mata) terhadap orang orang yang berjenis kelamin sama, dengan atau tanpa hubungan fisik (jasmaniah).

### 3. Pengertian MSM (Men who have Sex with Man)

Menurut Dede Utomo (2006), MSM adalah suatu istilah untuk menjelaskan pria yang berhubungan seks dengan pria, tapi menolak untuk dikatakan sebagai gay.

Dalam kesehariannya, ada pria yang menikah dengan seorang wanita dan mempunyai anak. Beberapa organisasi dan individu lebih menyukai terminology pria ber-

hubungan seks dengan pria. Di Indonesia, contohnya seorang warok, untuk menjaga kesaktiannya, ia harus berhubungan seks dengan seorang anak laki laki yang disebut "gemblakan".

### 4. Pengertian Gay

Gay adalah istilah yang diadaptasi dari bahasa Inggris, yang dalam konteks bahasa dapat berarti gemerlap, ceria, gembira dan sebagainya.

Kata gay mengacu pada orang atau sifat homoseks yang dimanifestasikan sebagai gaya hidup. Seharusnya kata ini mengacu pada laki laki maupun perempuan, namun pada realitasnya istilah gay untuk menyebut laki laki yang memiliki orientasi seksual sejenis (homoseks laki laki).

## D. PEMBAHASAN

Kabupaten Karanganyar yang relative dekat dengan perbatasan berbagai kota/daerah menjadikan masyarakat di kabupaten ini cukup mobil dan memiliki intensitas tinggi untuk berinteraksi dengan daerah lain. Kabupaten yang mayoritas penduduknya masih memegang teguh agama, adat istiadat dan juga norma norma sosial ini, ternyata ada sebagian kecil warganya yang memiliki orientasi seksual dengan sesama jenis, namun karena sekat budaya dan norma yang masih kuat, keberadaan mereka pun seolah non-visible atau tersembunyi baik dalam keluarga, kerabat maupun masyarakat.

Di Indonesia homoseksualitas paling tidak sudah terjadi sejak abad 19. Dede Oetomo, pegiat LGBT, menyatakan bahwa praktek homoseksualitas sudah menjadi budaya di Indonesia. Sebagai contohnya para warok reog Ponorogo, konon akan kehilangan kesaktiannya bila berhubungan badan dengan seorang wanita sehingga para warok itu selalu mempunyai gendak, yaitu seorang pemuda tampan sebagai simpanan, dan sebagai pelampias nafsu seksualnya.

Untuk sementara, homoseksualitas di Kabupaten Karanganyar memang belum ter-

petakan secara pasti. Data yang menunjukkan kuantitas kaum homoseks sendiri belum terdata. Jangkauan dari LSM yang bergerak di bidang inipun juga belum menyentuh secara lebih mendalam. Namun dari beberapa data yang berhasil kami kumpulkan selama penelitian, ternyata beberapa dari para homoseksual berasal dari kota ini.

Untuk melihat dinamika kehidupan gay dan MSM yang berasal dari pedesaan dapat diketahui dari data yang berasal dari wawancara dengan beberapa nara sumber, baik gay, MSM maupun beberapa tokoh masyarakat.

SR (nama disamarkan) sebenarnya adalah seorang pemuda yang cerdas dan normal seperti yang lain. Sewaktu di SMA dia selalu mendapat ranking. Hanya satu yang ia merasa tidak mampu mengikuti, yaitu olahraga. Sebagai pelajar berprestasi ia ingin mendapat nilai tinggi pada pendidikan olah raga seperti pelajaran lain. Keinginan Sr untuk mendapat nilai sempurna disemua mata pelajaran, tampaknya membuatnya semakin berambisi melakukan apapun demi sebuah nilai (prestasi).

Sampai suatu saat ia mendekati guru olahraganya untuk dibimbing dalam pelajaran olah raga. Namun kenyataan yang dihadapi gurunya bisa memberikan nilai bagus pada pelajaran olah raga asal SR mau diajak berhubungan seksual guru olah raganya yang juga seorang laki-laki. Demi memenuhi ambisi untuk menjadi juara di kelas, dan bisa mendapat beasiswa, SR pun bersedia melayani gurunya. SR berasal dari keluarga yang pas-pasan, ayahnya sudah meninggal sehingga ia tinggal bersama ibunya dengan 6 saudaranya. Ini sebenarnya yang mendorong SR dengan kecerdasan yang dimiliki, ia harus bisa mendapat beasiswa demi kelanjutan sekolahnya. Dan berhasil lulus dari sekolah favorit di kota Solo, ia meneruskan studi di Jakarta. Di ibukota ini ternyata SR juga mengalami hal yang sama. Demi bisa memenuhi cita-cita untuk bisa

sekolah tinggi, ia harus melayani orang kaya yang menjadi ayah angkatnya. SR pun bersedia demi cita-cita dan juga kelangsungan sekolah adik-adiknya. Akan tetapi setelah lulus kuliah SR yang ingin menjadi manusia normal akan kembali ke Solo, ayah angkat membolehkan tapi hanya sementara dan SR harus kembali ke Jakarta dan ijazah SR ditahan di Jakarta. SR pun kembali ke keluarganya tanpa ijazah yang didambakannya. Dengan kondisi keluarga pas-pasan SR mencoba untuk bekerja, bahkan ia pernah memiliki usaha ekspor mebel tapi bangkrut karena tidak berpengalaman. SR adalah pemuda supel sehingga ia juga banyak mempunyai teman. Dengan sulitnya mencari kerjanya SR kembali ke dunia semula, sebagai pria homoseks dan demi uang ia bekerja di sebuah salon dengan sambil melayani laki-laki yang membutuhkannya. Akhirnya ibu dan saudaranya tau apa pekerjaan SR sebenarnya, ibunya marah dan SR pun diusir dari rumah. Akhirnya ia tinggal di kawasan Sri Wedari meneruskan profesinya sebagai pria penjual seks. Namun demikian dari wawancara yang kami lakukan, sebenarnya suatu saat nanti setelah adik-adiknya lulus sekolah dan mendapat kerja, ia tetap ingin membina keluarga normal dengan menikahi wanita sebagai istrinya. Sampai saat ini SR memang masih berhubungan baik dengan saudara-saudaranya dan membantu biaya pendidikan mereka.

Tarif SR sebagai PPS dibidang cukup tinggi dibanding teman teman PPS lainnya. Dan dari penghasilan ini salah satu adiknya ada yang bisa menjadi dokter. Ibunya dengan berat hati akhirnya mau menerima SR sebagaimana adanya, sebenarnya ingin SR kembali kerumah. Namun demi kenyamanan keluarganya, SR tidak mau dan tetap tinggal di jalanan sebagai PPS yang kini jangkauannya sudah dari kota ke kota. Sehingga sewaktu peneliti ingin wawancara harus menunggu saat ia di Solo, di sebuah hotel sederhana.

Menurut Sofyan S Willis (2005 : 26 – 27), homoseksual yang dialami SR dapat diakibatkan karena adanya pengaruh lingkungan. Menurutnya beberapa faktor homoseksualitas yang disebabkan oleh lingkungan diantaranya adalah :

- ☒ terpisah dengan lawan jenis dalam jangka waktu lama. Misal dipenjara, asrama dll
- ☒ pengalaman hubungan seks dengan sesama jenis waktu kecil (masa kanak-kanak) dengan istilah sodomi
- ☒ kesalahan kesalahan perlakuan, yakni anak laki-laki yang hidup di rumah tangga dimana semua saudaranya perempuan. Bila anak ini diperlakukan seperti anak perempuan maka akan tumbuh sifat-sifat kewanitaan pada dirinya (merasa diri sebagai jenis kelamin wanita).

Responden lain Pi (38), ia adalah seorang homoseks yang juga berasal dari Karanganyar, yang kesehariannya berjualan makanan di kawasan Sri Wedari. Pada mulanya Pi tinggal dirumahnya di lereng gunung Lawu Karanganyar. Namun karena ada masalah dengan keluarga membuat ia meninggalkan rumah dan tinggal di Sri Wedari yang terletak di jantung kota Solo. Sri Wedari tampaknya memberikan kenyamanan tersendiri bagi kaum homoseks. Tempat ini memang kawasan yang sudah dikenal sebagai tempat nongkrongnya atau bahasa kerennya sebagai salah satu hotspot homoseksual di kota Solo.

Lain SR dan Pi, ada seorang pria sebut saja Ad (45). Ia sebenarnya seorang ayah satu anak. Pekerjaan sehari-hari di Solo telah memperkenalkan dirinya dengan seorang gay yang berasal dari Karanganyar, sebut saja Gt. Hubungan Ad dan Gt semakin akrab yang muaranya sebagai pasangan homo. Bahkan keakraban mereka, Gt sering ke rumah Ad dan bertemu anak Ad, yang memperkenalkan Gt adalah seorang teman. Ad menuturkan istrinya adalah sosok istri yang baik. Meski Ad jarang pulang, istrinya

tidak memasalahkan. Tahunya Ad bekerja mencari uang untuk keluarga.

Motif Ad, dan Gt yang memilih tinggal di kawasan Sri Wedari, mengindikasikan bahwa mereka merasa nyaman untuk mengekspresikan homoseksualitas mereka di lingkungan yang baru dan tidak mengenal mereka sama sekali. Begitu pula SR yang memilih untuk mengekspresikan dirinya di luar tempat tinggalnya, karena pandangan masyarakat yang masih belum terbuka terhadap keberadaan kaum homoseksual.

Lain lagi dengan penuturan Y (45), seorang pendidik, yang tinggal di Karanganyar. Y mungkin dapat dikategorikan seorang MSM, karena dia menikah dengan seorang perempuan, namun tidak dikaruniai anak. Untuk mengorek pribadi Y cukup susah, karena profesinya sebagai pendidik dan juga pebisnis, membuat Y cukup hati-hati dalam mengungkapkan jati dirinya. Dalam kesehariannya Y tampak seperti seorang bapak pada umumnya. Pembawaannya pun cukup berwibawa dan sering memberikan nasihat pada generasi muda. Di lingkungan masyarakat Y tinggal, ia cukup disegani. Dan Y pun sering menyambangi Sri Wedari.

Seorang gay, N (30) yang berasal dari Boyolali, juga merasa lebih nyaman untuk mengekspresikan homoseksualitasnya di lingkungan di luar tempat tinggalnya. N menuturkan, bahwa keluarganya tidak perlu tau kalau ia seorang homoseksual dan iapun tak perlu mengatakannya. Yang penting baginya adalah bisa bahagia dengan keadaannya selama ini dan merasa lebih nyaman berhubungan seksual dengan sesama jenis. Dan ini dilakukan bisa di Solo ataupun di Jogja.

Seperti halnya penuturan Nu (28), seorang MSM asal Karanganyar juga memilih untuk berkencan dengan PPS di luar lingkungan tempat tinggalnya.

Untuk memperjelas asumsi alasan kaum homoseksual tersebut lebih menyukai lingkungan di luar tempat tinggal mereka, berikut adalah beberapa data wawancara

dengan nara sumber yang terdiri dari tokoh masyarakat dan guru yang juga mewakili tokoh agama.

Narasumber pertama adalah seorang aparat pemerintah desa yang menjabat sebagai Bayan di Kecamatan Colomadu Karanganyar, Hendi yang memberikan pendapatnya: "Homoseksual atau hubungan sesama jenis itu sudah ada sejak jaman Nabi Luth. Kalau menurut saya pribadi, biarlah berjalan seperti apa adanya, karena itu sudah merupakan jalan hidup yang dia pilih. Saya sendiri tidak berani melarang tapi juga tidak berani memperbolehkan".

Menurut Hendi, keluarga menjadi faktor penentu seseorang menjadi homoseksual atau tidak. Keluarga adalah tempat pertama seorang anak mendapatkan pendidikan moral dan agama, sekaligus juga sebagai filter dari pengaruh luar yang bertentangan dengan norma yang dianut masyarakat. Jika tidak ada pondasi yang kuat dari keluarga, maka anak akan mudah terpengaruh hal-hal yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Meski Hendi tidak bisa menolak keberadaan homoseksual dalam masyarakat, namun dia berharap bahwa warganya jangan sampai ada yang menjadi homo. Dan ia juga berharap agar para homoseksual berusaha semampunya untuk menjadi orang yang normal. Karena menurutnya, orang hidup itu tujuannya untuk membentuk sebuah keluarga yang bereproduksi. Kalau sesama jenis tidak bias berreproduksi. Untuk meredam homoseksualitas menurut Hendi lebih baik memperkuat landasan agama, dan hal ini dikembalikan pada keluarga, di samping lingkungan harus berperan aktif.

Sedang menurut ibu Winarsih, seorang guru SMP di Colomadu, mengungkapkan keprihatinannya dengan persoalan homoseksualitas yang marak terjadi. Menurut beliau yang beragama Islam, bahwa agama tidak melarang homoseksual tapi berusaha untuk mencegah. Mereka diarahkan pada kegiatan kegiatan yang sesuai dengan jenis kelaminnya.

Dari beberapa argument diatas, dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan faktor yang cukup berperan dalam membentuk sifat homoseks seseorang.

Padahal homoseksual tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor keluarga. Menurut Willis (2005) beberapa faktor homoseksualitas tersebut disebabkan oleh :

- ☒ Faktor hereditas (dibawa sejak lahir) dan ini jarang terjadi
- ☒ Faktor ketidak seimbangan hormone seks (sex hormonal imbalance)
- ☒ Faktor lingkungan .

Area Sri Wedari adalah salah satu hot spot nya kaum homoseks dan MSM, menjadi salah satu tempat faforit bagi para gay atau MSM untuk bercengkerema. Para gay dan MSM tampaknya cukup nyaman berada di area ini. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaknyamanan yang mereka dapatkan di rumah, yang sangat tidak mungkin menunjukkan atau mengekspresikan dirinya sebagai kaum homoseks.

Masih lekatnya nuansa agamis di masyarakat Indonesia pada umumnya, menyebabkan kaum homoseks kurang bisa mengekspresikan kondisi dirinya.

Terlebih pandangan mayoritas masyarakat masih beranggapan bahwa homoseks adalah penyakit masyarakat, sehingga hal ini mengarah ke diskriminasi bagi kaum homo.

Stigma sebagai "penyakit masyarakat" itulah yang menyebabkan kaum homoseksual cenderung menutup diri dari masyarakat. Terlebih yang tinggal di pedesaan mereka cenderung memilih mengekspresikan perilaku homoseks mereka di tempat lain, dalam hal ini di perkotaan, karena masyarakat perkotaan cenderung lebih terbuka dan individual.

## Kesimpulan

Homoseksualitas sudah berlangsung sejak Nabi Luth. Di Indonesia sendiri homoseksualitas atau hubungan sesama jenis juga sudah tersurat dalam Serat Centini.

Pada masa Hindu Budha, misalnya simbol laki-laki dan perempuan disatukan dalam satu tubuh, dan disimbolkan dengan patung Ardhanari. Demikian pula dalam kehidupan Warok di Ponorogo yang selalu memiliki gemblak atau simpanan pemuda sebagai teman kencannya, karena pantang bagi seorang warok untuk behubungan seks dengan wanita, karena akan menghilangkan kesaktiannya.

Kehidupan yang terus berjalan membawa masyarakat dari yang tertutup dengan segala aturan adat istiadat, norma dan ajaran agama menjadi semakin terbuka dan bersikap individual. Namun perkembangan masyarakat tersebut terjadi di semua lapisan masyarakat. Untuk sementara hanya masyarakat di perkotaan saja yang sudah mulai membuka diri dan menerima kehadiran homoseksual. Namun tidak dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Masyarakat pedesaan masih terikat dengan berbagai macam aturan menyebabkan mereka masih memandang bahwa kaum homoseksual adalah penyakit masyarakat yang harus disembuhkan. Budaya seperti ini menjadi ganjalan tersendiri bagi kaum homo

yang tinggal di pedesaan dalam mengekspresikan dirinya. Sehingga untuk menghindari sorotan tajam masyarakat, para gay di pedesaan memilih untuk "hijrah" ke perkotaan yang sudah bisa menerima kehadiran mereka serta bisa berkumpul dengan keluarga barunya, yaitu "komunitas homo".

#### E. Penutup

Dalam penelitian yang berjudul "Upaya Kaum Gay Pedesaan Dalam Mengekspresikan Jati Dirinya" penulis susun hanya dalam waktu yang relative singkat, karena terkendala oleh tugas tugas lain yang tak bisa ditinggalkan. Sehingga peneliti menyadari bahwa hasil dari penelitian ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian harapan penulis, hasil penelitian ini tetap bermanfaat bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang kehidupan kaum gay yang sampai saat ini mayoritas masyarakat masih belum bisa menerima dan masih bersikap diskriminatif.

Akhir kata penulis mengharapkan masukan masukan demi sempurnanya penelitian kami dimasa mendatang.

## Daftar Pustaka

- Kartono, Kartini, 2001 : Patologi Sosial JILID I, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, Patologi Sosial Jilid II, Kenakalan Remaja ; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Monks, FJ dkk 2004 < Psikologi Perkembangan, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.
- Oetomo, Dede 2003, Memberi Suara Pada Yang Bisu, Pusaka Marwa Yogyakarta.
- Panuju, Panut dan Ida Umami 2005, Psikologi Remaja, PT Tiara Wacana Yogyakarta.
- Spraedly, James P, 1007, Metode Etnografi, PT Tiara Wacana Yogyakarta.
- Sutopo HB 2002 ; Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Penerapannya; Sebelas Maret University Press Surakarta.
- Willis, Sofyan S 2005, Remaja dan Permasalahannya, Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja, Narkoba ,Free Sex, dan Pemecahannya.

**Sumber Internet:**

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

[www.4me4u389.blogspot.com](http://www.4me4u389.blogspot.com)

[www.wikimu.com](http://www.wikimu.com)

[www.stefirengkuan.multiply.com](http://www.stefirengkuan.multiply.com)

[www.christianpost.com](http://www.christianpost.com)

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

[www.itb.ac.id](http://www.itb.ac.id)

[www.surabayapost.co.id](http://www.surabayapost.co.id)

[www.asia.geocities.com](http://www.asia.geocities.com)

[www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com)

[www.gatra.com](http://www.gatra.com)

## PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH DAN PENELITIAN SOSIAL DILEMA SOSIOLOGI

Jurnal Ilmiah dan Penelitian Sosial DILEMA (Dialektika Masyarakat) SOSIOLOGI menerima naskah Ilmiah berupa hasil penelitian atau artikel dalam bidang Ilmu Sosiologi. Adapun pedoman penulisan naskah adalah :

1. Naskah belum pernah dimuat atau sedang diajukan untuk dimuat dalam media publikasi lainnya.
2. Naskah diketik pada kertas HVS ukuran A4/kwarto, dengan jarak 1,5 spasi, font 12 (margin : atas – bawah – kanan 3 cm, kiri 4 cm), disket disertakan.
3. Judul naskah seluruhnya ditulis dengan huruf besar dilengkapi dengan judul dalam bahasa Inggris. Di bawah judul ditulis nama para penulis (tanpa gelar), dan tambahkan catatan kaki tentang instansi dan jabatan penulis.
4. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris untuk naskah berbahasa Indonesia dan sebaliknya (maksimum 250 kata).
5. Sistematika penulisan naskah terdiri atas :
  - a. Hasil Penelitian : Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran, Ucapan Terima Kasih (kalau ada), Daftar Pustaka.
  - b. Artikel : Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, Daftar Pustaka.
6. Penulisan daftar pustaka berpedoman pada contoh berikut :
  - a. Terbitan Berseri :

Leibo, Jefta. 2003. Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Timur Indonesia, Wanodya, Jurnal Ilmiah Penelitian Kajian Wanita dan Gender, No. 15 Tahun XIII, 51 – 55.
  - b. Buku :

Kuhn, Thomas. 1970. The Structure of Scientific Revolutions. (1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> ed). University of Chicago Press. Chicago.
  - c. Makalah Seminar :

Haryono, Bagus. (2004, Oktober). Menemukan Model Kontrol Sosial yang Efektif. Makalah disajikan dalam Seminar Hasil Penelitian Dosen Muda. Surakarta.
  - d. Tulisan yang tidak dipublikasikan :

Utami, Trisni. 1994. Pola Adaptasi dalam Penerimaan Inovasi pada Sistem Pertanian Peladangan di Daerah Transmigrasi Rajawajitu Lampung Utara. Tesis (S2) yang tidak dipublikasikan. Program Studi Ekologi manusia. Universitas Indonesia. Jakarta.
7. Redaksi berhak mengubah naskah dengan tidak mengurangi pokok isi tanpa ijin penulis.

Demikian syarat penulisan yang harus ditaati setiap calon penulis. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

